

LAPORAN KINERJA (LKj) INSTANSI PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Tahun 2020



PEMERINTAH
DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

KATA PENGANTAR



H. MUSA AHMAD, S.Sos.
Bupati Lampung Tengah
Periode 2021 - 2026

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah se-Kabupaten Lampung Tengah, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

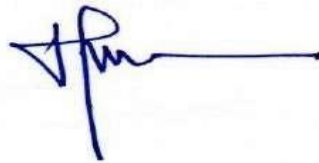
Laporan Kinerja ini disusun sebagai media pertanggungjawaban atas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai sarana untuk mengevaluasi capaian kinerja pemerintah secara berkelanjutan, sehingga laporan kinerja ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif, dan efisien, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Secara umum Laporan Kinerja (Lkj) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 ini memuat informasi tentang Perencanaan dan Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Periode 2016-2021, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis serta juga memuat pertanggung jawaban aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima oleh masyarakat.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 serta dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja di tahun mendatang, dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Gunung Sugih, 29 Maret 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



MUSA AHMAD

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 ini merupakan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagai perwujudan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021, Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021 adalah **“MENJADIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH SEBAGAI LUMBUNG PANGAN YANG AMAN, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN”**,

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang akan dilakukan adalah :

1. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman warga dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi, keadilan, dan keberagaman budaya.
2. Membangun dan meningkatkan infrastruktur strategis berbasis pengembangan wilayah yang terpadu.

3. Membangun ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
5. Mengelola fungsi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan.
6. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan Pro Rakyat.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2020, maka dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sebagai berikut :

Misi 1, dapat digambarkan sebagai berikut :

- Prosentase rasio angka kriminalitas atau jumlah tindak kriminalitas dalam satu Tahun per jumlah penduduk pada Tahun 2020 sebesar 4.19 persen atau mengalami penurunan jika dibandingkan pada Tahun 2019 sebesar 4.25 persen.
- Jumlah kasus konflik sosial yang terjadi pada Tahun 2020 sebesar 0 kasus atau tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 0 kasus.
- Prosentase situs budaya yang lestari pada Tahun 2020 sebesar 80 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 70 persen.
- Prosentase sanggar seni budaya yang aktif pada Tahun 2020 sebesar 85 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 80 persen.

Misi 2, dapat digambarkan sebagai berikut :

- Keberhasilan pembangunan dibidang prasarana jalan dilihat dari jalan kabupaten yang kondisinya baik. Pada Tahun 2020 prosentase panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik atau jumlah seluruh jaringan jalan sebesar 56.4 persen atau

mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 61.08 persen.

- Pada Tahun 2020 prosentase pelayanan angkutan jalan sebesar 60 persen atau tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan pada Tahun 2019 sebesar 60 persen.
- Pada Tahun 2020 prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 80.88 persen atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 80 persen.
- Pada Tahun 2020 prosentase cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 94.35 persen atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 88.12 persen.
- Pada Tahun 2020 prosentase penurunan luasan kawasan kumuh sebesar 0.7 persen atau mengalami penurunan dibandingkan pada Tahun 2019 sebesar 1,54 persen.
- Pada Tahun 2020 jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih sebesar 89.5 persen dari jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2019 yang sebesar 88.12 persen.
- Pada Tahun 2020 jumlah rumah tinggal bersanitasi sebesar 94.3 persen atau mengalami kenaikan dibandingkan pada Tahun 2019 sebesar 93.12 persen.
- Prosentase cakupan layanan telekomunikasi pada Tahun 2019 sebesar 72.50 persen atau tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 72.50 persen.

Misi ke-3, dapat digambarkan sebagai berikut :

- Prosentase pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada Tahun 2020 sebesar -1.03 persen atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 2,03 persen.

- Prosentase pertumbuhan ekonomi sektor industri pada Tahun 2020 sebesar -5.04 persen atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 8.63 persen.
- Prosentase pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan pada Tahun 2020 sebesar -3.82 persen atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 6.51 persen.
- Prosentase peningkatan volume usaha koperasi pada Tahun 2020 sebesar 18.04 persen persen atau mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 17.23 persen.
- Prosentase peningkatan volume usaha UMKM/UKM pada Tahun 2020 sebesar 11.14 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 9.87 persen.
- Prosentase peningkatan jumlah wisatawan pada Tahun 2020 sebesar 2.88 persen atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 77.63 persen.
- Rata-rata lama tinggal wisatawan pada Tahun 2020 selama 1 hari atau tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dibandingkan Tahun 2019 selama 1 hari.
- Prosentase peningkatan nilai investasi pada Tahun 2020 sebesar 9 persen atau tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 9 persen.
- Prosentase angka kemiskinan pada Tahun 2020 sebesar 11.82 persen atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 12.62 persen.
- Prosentase angka pengangguran terbuka pada Tahun 2020 sebesar 4.22 persen atau mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 2.62 persen.
- Prosentase peningkatan jumlah Kampung dengan kategori cepat berkembang pada Tahun 2020 sebesar 68.7 persen atau tidak mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 44

persen. Hal ini dikarenakan pada Tahun anggaran 2020 pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran dana alokasi Kampung kurang lebih sebesar Rp.146.170.968.200,- yang dialokasikan untuk 301 Kampung. Alokasi tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pembangunan Kampung, pemberdayaan masyarakat Kampung dan pembinaan kemasyarakatan.

- Jumlah penduduk yang mengikuti program transmigrasi keluar Lampung Tengah pada Tahun 2020 sebanyak 0 KK atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebanyak 13 KK.
- Rasio ketersediaan pangan atau jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)/jumlah penduduk pada Tahun 2020 sebesar 315.67 kg/penduduk/Tahun atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 368.17 kg/penduduk/Tahun.

Secara umum keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang ketahanan pangan dapat dilihat dari skor Pola Pangan harapan (PPH), Ketersediaan Pangan Utama (beras) per kapita per tahun, dan ketersediaan energi, lemak dan protein. Pada tahun 2020 Skor PPH Kabupaten Lampung Tengah mencapai 82,7 persen atau mengalami penurunan sebesar 2,5 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 85,2 persen. Hal ini disebabkan menurunnya nilai pola pangan harapan untuk jenis pangan kacang-kacangan yang sebelumnya 3,8 menjadi 3,3, penurunan juga terjadi pada sayur dan buah yang semula 29,3 menjadi 26,3. Penurunan ini dikarenakan menurunnya impor kacang-kacangan di tahun 2020 yang berakibat penurunan ketersediaan dan konsumsi produk tersebut oleh masyarakat. Sedangkan untuk jenis produk lainnya beberapa meningkat dan yang lainnya tetap.

Misi ke 4, dapat digambarkan sebagai berikut :

- Rata-rata lama sekolah penduduk per jumlah penduduk pada Tahun 2020 sebesar 8.26 Tahun atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 8.09 Tahun.
- Lamanya harapan sekolah pada Tahun 2020 sebesar 12.26 Tahun atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 12.25 Tahun.
- Nilai rata-rata ujian SD pada Tahun 2020 sebesar 76.5 atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 76.
- Nilai rata-rata ujian SMP pada Tahun 2020 sebesar 81.25 atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 81.
- Usia harapan hidup/angka harapan hidup adalah rata-rata Tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku dilingkungan masyarakat pada Tahun 2020 sebesar 69.84 Tahun atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 69.46 Tahun.
- Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2020 sebesar 4.3 atau mengalami kenaikan dibandingkan pada Tahun 2019 sebesar 3.63 per 1000 kelahiran hidup.
- Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2020 sebesar 22 atau mengalami penurunan dibandingkan pada Tahun 2019 sebesar 17 per 100.000 KH.
- Prosentase prevalensi stunting pada Tahun 2020 sebesar 16.84 persen atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 13.85 persen.
- Prosentase Laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2020 sebesar 0.73 persen atau mengalami penurunan dibandingkan pada Tahun 2019 sebesar 0.8 persen.

- Indek pembangunan gender pada Tahun 2020 sebesar 89.40 atau tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 89.40.
- Prosentase Penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Tahun 2020 sebesar 100 persen dari 46 kasus atau mengalami peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan dibandingkan Tahun 2019 sebanyak 45 kasus.
- Prosentase peningkatan jumlah wirausahaan muda pada Tahun 2020 sebesar 0 persen atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 3 persen.
- Prosentase cabang olah raga yang berprestasi pada Tahun 2020 sebesar 0 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 28 persen.

Misi ke 5, dapat digambarkan sebagai berikut :

- Pada Tahun 2020 indek kualitas air sebesar 73.58 IKA atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 71.48 IKA.
- Pada Tahun 2020 indek kualitas udara sebesar 84.35 IKU atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 86.35 IKU.
- Pada Tahun 2020 indek tutupan lahan sebesar 30.13 TL atau sama jika dibandingkan Tahun 2019 sebesar 30.13 TL.
- Pada Tahun 2020 ketaatan terhadap RT RW sebesar 73.4 persen atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 95.32 persen.
- Pada Tahun 2020 persentase desa siaga bencana sebesar 3.22 persen atau tidak mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 3.86 persen.

Misi ke 6, dapat digambarkan sebagai berikut :

- Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah daerah. Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah adalah nilai hasil evaluasi atas laporan kinerja instansi Pemerintah daerah pada Tahun 2020 adalah B Nilai ini sama jika dibandingkan Tahun 2019 nilai B.
- Pada Tahun 2020 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah WTP atau tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dibandingkan Tahun 2019 adalah WTP.
- Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah pada Tahun 2020 sebesar 5.9 persen atau mengalami penurunan dibandingkan pada Tahun 2019 sebesar 7.5 persen.
- Nilai Indek Kepuasan Masyarakat yang dicapai pada Tahun 2020 adalah 85.90 atau sama jika dibandingkan pada Tahun 2019 sebesar 85.90

Secara umum keseluruhan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 telah berhasil dicapai dan sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun didalam pelaksanaan masih dijumpai permasalahan dan kendala, namun secara umum dapat diatasi secara bijaksana sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang berarti dalam pencapaian target sasaran tersebut. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang mungkin timbul pada Tahun yang akan datang, telah dilakukan langkah-langkah antisipasi terutama meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program, baik dengan perangkat daerah di tingkat kabupaten maupun Pemerintah Propinsi dan Pusat.

Demikian ikhtisar eksekutif Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, semoga dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Lampung Tengah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v

BAB. I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1-1
2. Dasar Hukum	I-3
3. Maksud dan tujuan	I-5
4. Kondisi Geografis Daerah	I-6
5. Kondisi Umum Demografi.....	I-11
6. Kondisi Ekonomi.....	I-14
7. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB.....	I-18
8. Isu-Isu Strategis.....	I-22
9. Sistematika Laporan.....	I-33

BAB. II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021	II-35
2. Penetapan Kinerja Tahun 2020	II-61

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja.....	III-68
2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya.....	III-101
3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Kinerja Yang Telah Dicapai.....	III-107
4. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.....	III-112

BAB. IV PENUTUP

1. Kesimpulan V-117
2. Saran-Saran IV-118

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Kampung dan Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020	I-7
Tabel 1.2 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2020 (<i>Milyar Rupiah</i>)	I-19
Tabel 1.3 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2020 (<i>Milyar Rupiah</i>)	I-20
Tabel 1.4 Laju pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2020 (Persen)	I-21
Tabel 3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi I Tahun 2020	III-70
Tabel 3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi II Tahun 2020	III-73
Tabel 3.3 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi III Tahun 2020	III-79
Tabel 3.4 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi IV Tahun 2020	III-87
Tabel 3.5 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi V Tahun 2020	III-94
Tabel 3.6 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi VI Tahun 2020	III-98
Tabel 3.7 Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi I	III-101
Tabel 3.8 Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi II	III-102
Tabel 3.9 Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi III	III-103
Tabel 3.10 Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi IV	III-104
Tabel 3.11 Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi V	III-106
Tabel 3.12 Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi VI	III-106
Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2020	III-108
Tabel 3.14 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Capaian Kinerja Tahun 2020	III-111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu Tahun Anggaran. Laporan Kinerja (LKj), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal Tahun Anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah

dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusun LKj Tahunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara No.091), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor: 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3825);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 131. 18 – 6118 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lampung Tengah Propinsi Lampung.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016–2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2020 ini adalah:

1. Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2020 kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

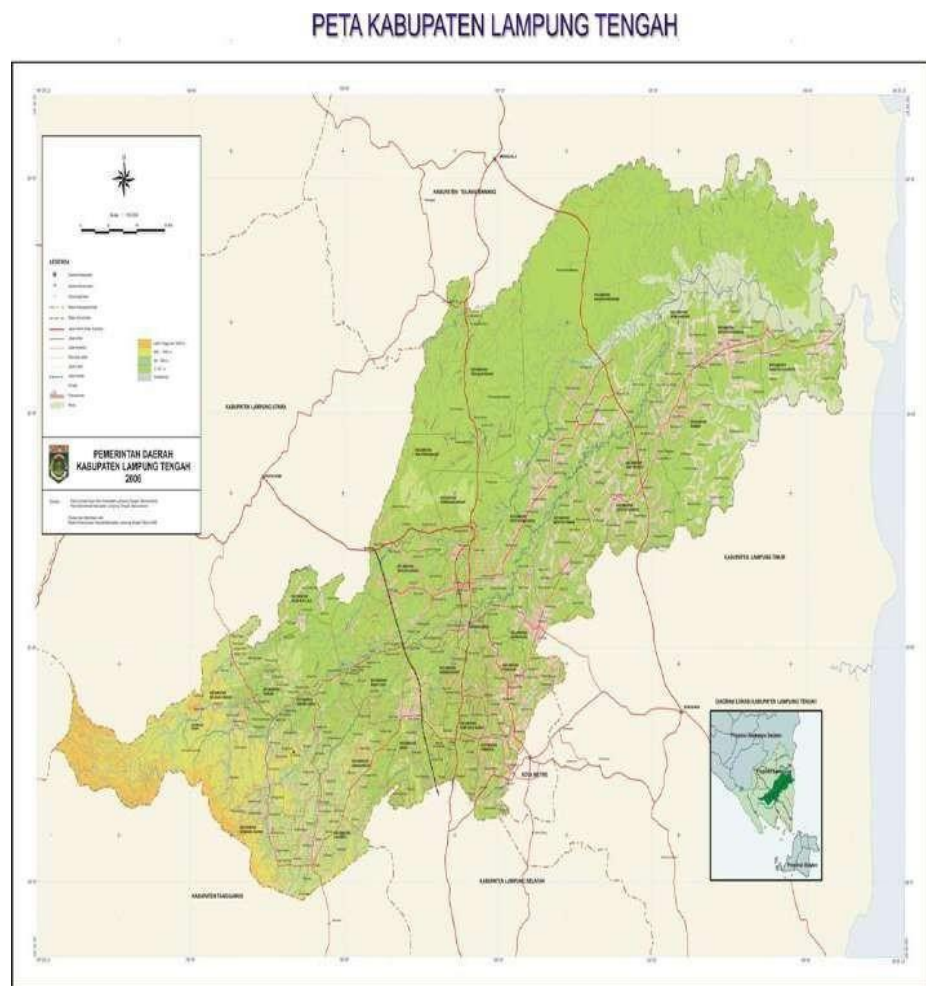
2. Laporan kemajuan (*Progress Report*) secara nyata, jelas, dan transparan atas pelaksanaan program kerja/ kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan tolok ukur Renstra/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
3. Bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan program kerja guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

1.4. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

1.4.1. Batas Administrasi

Kabupaten Lampung Tengah meliputi areal seluas 4.789,82 Km² yang terletak pada bagian tengah Provinsi Lampung, berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Utara
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, Pesawaran dan Lampung Selatan
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah Terdiri atas satu Kabupaten dan 28 Kecamatan dengan 311 Kampung dan 10 Kelurahan, dengan perincian :

Tabel 1.1
Jumlah Kampung Dan Kelurahan Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020

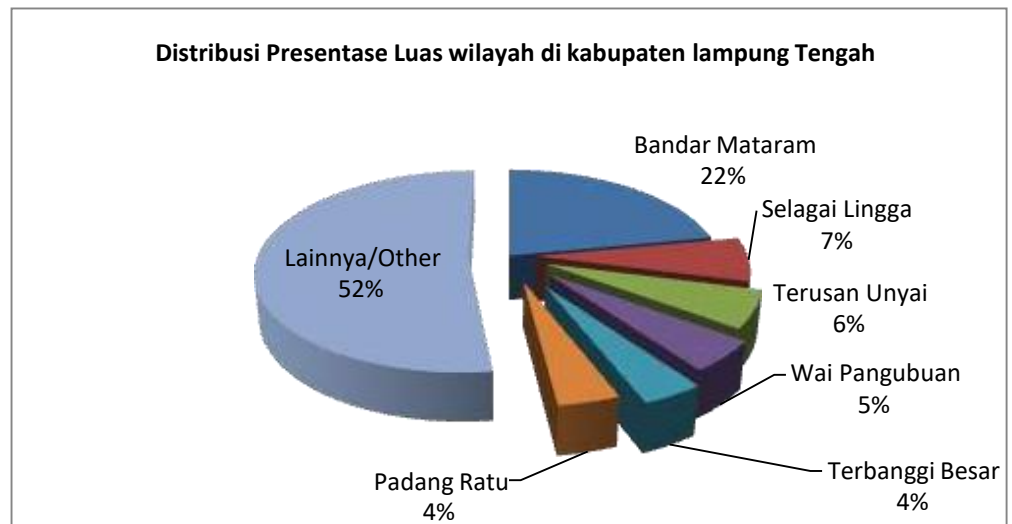
Kecamatan	Kampung	Kelurahan
1. Padang Ratu	15	-
2. Selagai Lingga	14	-
3. Pubian	20	-
4. Anak Tuha	12	-

5. Anak Ratu aji	6	-
6. Kalirejo	17	-
7. Sendang Agung	9	-
8. Bangun Rejo	17	-
9. Gunung Sugih	15	4
10. Bekri	8	-
11. Bumi Ratu Nuban	10	-
12. Trimurjo	14	3
13. Punggur	9	-
14. Kota Gajah	7	-
15. Seputih Raman	14	-
16. Terbanggi Besar	10	3
17. Seputih Agung	10	-
18. Way Pengubuan	8	-
19. Terusan Nunyai	7	-
20. Seputih Mataram	12	-
21. Bandar Mataram	9	-
22. Seputih Banyak	13	-
23. Way Seputih	6	-
24. Rumbia	9	-
25. Bumi Nabung	7	-
26. Putra Rumbia	10	-
27. Seputih Surabaya	13	-
28. Bandar Surabaya	10	-
Jumlah	311	10

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah

1.4.2. Luas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak di antara 4°30'-4°15' Lintang Selatan dan 104°35'- 105°50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 4.789,82 km². Dari luas



Provinsi lampung 35.376 km².

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah

1.4.3. Topografi

Kabupaten Lampung Tengah yang terletak di bawah garis khatulistiwa 5° Lintang Selatan beriklim Tropis-Humid dengan angin laut bertiup dari Samudra Indonesia dengan kecepatan angin rata-rata 5,83 Km/Jam, memiliki temperatur rata-rata berkisar antara 26°C - 28°C pada daerah dataran dengan ketinggian 30-60 meter.

Temperatur maksimum yang sangat jarang dialami adalah 33°C dan juga temperatur minimum 22°C. Sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 15-65 meter dpl dan mempunyai kemiringan lereng antara 0-2% (92,29%).

Keadaan lereng bervariasi, mulai datar, landai, miring, dan terjal, dengan penggolongan sebagai berikut :

- Lereng 0-2%, terletak pada ketinggian 50 meter dpl yang hampir tersebar di seluruh wilayah (92,16%).
- Lereng 2-15%, terletak pada ketinggian 50-100 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Padang Ratu, dan Kalirejo.
- Lereng 15-40%, terletak pada ketinggian 100-500 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Padang Ratu, dan Kalirejo.
- Lereng diatas 40%, terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dpl yang tersebar hanya di Kecamatan Padang Ratu, dan Kalirejo.

Berdasarkan karakteristik topografi tersebut, maka wilayah tanah usaha di Kabupaten Lampung Tengah dapat dikelompokkan menjadi 5 golongan yaitu :

a. Tanah Usaha Khusus I

Tanah usaha ini terletak pada ketinggian 0 – 7 m dpl yang tersebar di daerah-daerah pertemuan air. Sebagian besar daerah ini tergenang air secara periodik atau terusmenerus tergantung pada besar kecilnya volume air yang tertampung di tempat tersebut.

b. Tanah Usaha Utama IA dan B

Terletak pada ketinggian 7-40 m dpl yang dipergunakan untuk bendungan-bendungan besar dan pada ketinggian ini sebagian besar digunakan untuk usaha pertanian sawah.

c. Tanah Usaha Utama IC

Terletak pada ketinggian 50-100 m dpl, yang merupakan daerah persawahan yang relatif baik, akan tetapi biasanya daerah yang bisa diairi relatif berkurang.

d. Tanah Usaha Utama ID

Terletak pada ketinggian 100-500 m dpl dengan permukaan yang sudah agak bergelombang.

e. Tanah Usaha Utama II

Terletak pada ketinggian 500-1000 m dpl yang merupakan daerah peralihan antara daerah yang beriklim panas dengan yang beriklim sedang.

f. Tanah Usaha Utama II

Terletak pada ketinggian 500-1000 m dpl yang merupakan daerah peralihan antara daerah yang beriklim panas dengan yang beriklim sedang.

1.5. KONDISI UMUM DEMOGRAFI

1.5.1.Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin

Penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2020 berjumlah 1.460.045 jiwa. Data ini meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2019 yang berjumlah 1.281.310 jiwa. Komposisi penduduk Tahun

2020 yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 747.237 jiwa dan perempuan sebanyak 712.808 jiwa.

1.5.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan tingkat kemajuan masyarakat, makin tinggi tingkat pendidikan maka gambaran kemajuan masyarakat makin tinggi. Berikut ini gambaran keadaan pendidikan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.

Penduduk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 menurut ijazah yang dimiliki adalah tidak/belum sekolah 1.55 persen, tidak punya ijazah SD 17.26 persen, memiliki ijazah SD/MI/Paket A 26.11 persen, sedangkan yang memiliki ijazah SMP/MTs/Paket B 27.30 persen, SMA/SMK/MA/Paket C 22.51 persen dan Diploma I sampai dengan Universitas mencapai 5.26 persen.

1.5.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Ketenagakerjaan jika ditinjau dari dimensi ekonomi dan dimensi sosial merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan, berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan ekonomi. Penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2020 umumnya berusaha pada sektor pertanian yaitu sebesar

50.68 persen, kemudian diikuti sektor jasa 31.09 persen dan sektor manufaktur 18.23 persen.

1.5.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pada Tahun 2015 telah dilakukan perubahan metodologi penghitungan IPM, hal ini dilakukan karena sudah tidak relevannya indikator-indikator yang dipergunakan untuk dapat dibandingkan antar daerah secara baik. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu :

- Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*).
- Pengetahuan (*knowledge*)
- Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran.

Indeks kesehatan menggunakan variabel Angka Harapan Hidup saat Lahir-AHH (*Life Expectancy-e₀*) yaitu sebagai rata-rata perkiraan banyak Tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, hal ini dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Indeks pendidikan menggunakan variabel Rata-Rata Lama Sekolah-RLS (*Mean Years of Scholling-MYS*) dan Harapan

Lama Sekolah-HLS (*Expected Years of Schooling- EYS*). Rata-Rata Lama Sekolah merupakan jumlah Tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan Harapan Lama Sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Indeks Pengeluaran menggunakan variabel Pengeluaran Perkapita, disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Secara umum level IPM dengan metode baru lebih rendah dibanding dengan IPM metode lama, namun ini tidak mengindikasikan penurunan nilai IPM, karena penurunan ini disebabkan adanya perbedaan indikator dan metodologi penghitungannya.

Berdasarkan hasil perhitungan IPM pada Tahun 2021 Kabupaten Lampung Tengah nilai IPM 70.16. Dengan rincian Angka Harapan Hidup 69,84 Tahun, Harapan Lama Sekolah 12,92 Tahun, Rata-Rata Lama Sekolah 7,58 Tahun dan Pengeluaran Per Kapita Rp 11.219 juta.

1.6. KONDISI EKONOMI

1.6.1. Pertanian Tanaman Pangan

Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi lahan basah 77.721 Ha dan potensi lahan kering yang cocok untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura 144.049 Ha.

Pada Tahun 2020 luas lahan padi seluas 136.039 Ha dengan jumlah produksi sebesar 768.147 ton, luas lahan

jagung seluas 65.148 Ha dengan jumlah produksi sebesar 385.425,51 ton, Ubi Kayu dengan luas lahan seluas 103.779 Ha dengan jumlah produksi sebesar 2.203.462 ton.

1.6.2. Perkebunan

Komoditas perkebunan yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Tengah diantaranya komoditas kelapa sawit, kelapa, kakao, dan kopi.

Pada Tahun 2020 luas areal tanaman kelapa sawit sebesar 15.030 Ha dengan total produksi sebesar 43.503 ton, kelapa dalam luas areal sebesar 5.957 Ha dengan total produksi sebesar 6.942 ton, kakao luas areal sebesar 4.005 Ha dengan total produksi sebesar 2.992 ton, karet dengan luas areal sebesar 5.358 Ha dengan total produksi sebesar 4.931,98 ton, tebu dengan luas areal sebesar 8.990 Ha dengan total produksi sebesar 59.781 ton, lada dengan luas areal sebesar 123 Ha dengan total produksi sebesar 102 ton, selain hasil perkebunan rakyat tersebut, di Kabupaten Lampung Tengah terdapat perusahaan besar yang bergerak dibidang perkebunan seperti PTP Nusantara VII yang bergerak pada tanaman sawit, Gunung Madu Plantation, Gula Putih Mataram yang bergerak pada tanaman tebu dan gula.

1.6.3. Peternakan

Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan ternak besar maupun kecil. Untuk pengembangan ternak besar seperti sapi, kerbau maupun kambing potensi ketersediaan pakan cukup besar seperti rumput, limbah nenas, daun jagung, kulit kakao maupun pucuk daun tebu serta jerami padi. Sebagai gambaran pengembangan ternak di Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2020 populasi sapi sebanyak 311.259 ekor, kambing 289.975 ekor, ayam buras 1.014.199 ekor, ayam ras pedaging 1.054.883 ekor, dan ayam ras petelur 933.985 ekor.

1.6.4. Perikanan

Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan perikanan seperti kolam, perairan umum, perairan laut, keramba, mina padi maupun tambak. Potensi tersebut dapat dilihat dari jumlah produksi perikanan di Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2020 mencapai 47.494 ton.

1.6.5. Perindustrian

Potensi bidang industri di Kabupaten Lampung Tengah cukup besar, hal ini karena didukung oleh ketersediaan potensi bahan baku yang cukup terutama industri yang bergerak pada bidang agribisnis, sampai dengan Tahun 2020 jumlah unit usaha industri sebanyak 1.614 unit.

dengan total investasi sebesar Rp.1.502.667.646.811,- milyar.

1.6.6. Perdagangan dan Jasa

Potensi bidang perdagangan dan jasa di Kabupaten Lampung Tengah cukup menjanjikan mengingat letak geografis Kabupaten Lampung Tengah yang cukup strategis, berada ditengah-tengah Propinsi Lampung serta dilintasi oleh Jalan Lintas Trans Sumatera. Selain itu telah dikembangkan kawasan niaga terpadu yang diharapkan dapat menarik investasi dibidang perdagangan dan jasa sehingga mampu menggerakkan perekonomian daerah agar lebih berkembang, serta didukung oleh pusat-pusat perdagangan dan jasa pada masing-masing kecamatan seperti pasar daerah, pasar kampung dan kios serta toko-toko yang semakin berkembang. Sampai dengan Tahun 2020 berdasarkan SIUP yang telah diterbitkan jumlah usaha perdagangan mencapai 1.271 unit.

Volume ekspor produk yang berasal dari Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 mencapai 855.504.676,72 ton, dengan total nilai ekspor mencapai 16.237.797,74 US\$, selain itu dalam pengembangan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah didukung oleh sektor perbankan yang semakin berkembang baik bank nasional, bank daerah, maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

1.6.7. Pertambangan

Sesuai dengan formasi geologi dan jenis tanah yang ada, maka Kabupaten Lampung Tengah memiliki deposit mineral yang potensial untuk pengembangan usaha pertambangan terutama bahan tambang galian C. Potensi pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah diantaranya marmer, granit, andesit, felspart, pasir, diorit, Batu Kapur, Lempung, Pasir Kuarsa dan Pasir Batu (Sirtu).

1.7. PERTUMBUHAN EKONOMI/PDRB

1.7.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Tengah merupakan gambaran potensi wilayah Kabupaten Lampung Tengah sekaligus kemampuan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu proses produksi.

Berdasarkan harga berlaku PDRB Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Pada Tahun 2020 PDRB Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp 71.591,75 (dalam milyar) atau meningkat dibanding Tahun 2019 yang sebesar Rp. 71.380,74 (dalam milyar).

Demikian juga berdasarkan harga konstan PDRB Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan, pada Tahun 2020 PDRB Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.47.347,97 (dalam milyar) atau menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp. 47.837,69 (dalam milyar).

Tabel 1.2
PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019 - 2020 (Milyar Rupiah).

Kategori	Uraian	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16 057,52	16 222,16
B	Pertambangan dan Penggalan	2 207,70	2 280,77
C	Industri Pengolahan	11 169,86	10 607,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	55,61	60,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,46	17,39
F	Konstruksi	5 388,99	5 279,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5 134,73	4 938,66
H	Transportasi dan Pergudangan	1 329,53	1 273,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	489,26	463,99
J	Informasi dan Komunikasi	1 930,82	2 051,37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	720,29	747,11
L	Real Estate	938,03	909,17
M,N	Jasa Perusahaan	49,37	48,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	720,14	749,60
P	Jasa Pendidikan	1 108,64	1 161,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	251,36	278,57
R,S,T,U	Jasa lainnya	269,40	258,07
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	47 837,69	47 347,97

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 1. 3
PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019 - 2020 (Milyar Rupiah)

Kategori	Uraian	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25 035,73	25 837,69
B	Pertambangan dan Penggalian	3 502,27	3 641,52
C	Industri Pengolahan	16 678,44	16 139,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	68,92	73,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24,31	25,78
F	Konstruksi	7 606,73	7 409,22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7 154,15	6 971,51
H	Transportasi dan Pergudangan	1 906,02	1 834,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	830,90	801,93
J	Informasi dan Komunikasi	2 364,89	2 452,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 114,92	1 134,42
L	Real Estate	1 368,35	1 351,47
M,N	Jasa Perusahaan	81,87	81,59
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 203,68	1 280,07
P	Jasa Pendidikan	1 661,42	1 754,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	373,45	417,01
R,S,T,U	Jasa lainnya	404,68	385,97
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	71 380,74	71 591,75

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah

1.7.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Tingkat perkembangan riil ekonomi makro Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat dari pencapaian indikator Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE), atas dasar harga konstan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah pada 2020 mencapai sebesar -1,02 persen.

Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019 - 2020 (Persen)

Kategori	Uraian	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,90	1,03
B	Pertambangan dan Penggalan	5,97	3,31
C	Industri Pengolahan	8,15	-5,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,88	7,93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,01	5,60
F	Konstruksi	7,00	-2,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,95	-3,82
H	Transportasi dan Pergudangan	6,47	-4,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,67	-5,16
J	Informasi dan Komunikasi	7,95	6,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,55	3,72
L	Real Estate	4,98	-3,08
M,N	Jasa Perusahaan	4,54	-1,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,68	4,09
P	Jasa Pendidikan	7,94	4,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,52	10,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,26	-4,21
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,35	-1,02

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah

1.7.3. Pendapatan Perkapita

Indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari tingkat pendapatan per kapita penduduk pada setiap Tahunnya. Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2020**) sebesar Rp 55.479,98 (dalam ribu Rupiah) atau menurun dibanding Tahun 2019*) sebesar Rp 55.709,19 (dalam ribu Rupiah).

Pendapatan per kapita atas dasar harga konstan penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2020**) sebesar Rp 36.692,28 (dalam ribu Rupiah) atau menurun dibanding Tahun 2019*) sebesar Rp 37.334,99 (dalam ribu Rupiah).

1.8. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; atau sebaliknya, dalam hal tersebut tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi baik itu persoalan maupun peluang atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau

kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah, sedangkan secara populis, penetapan isu strategis dapat merupakan kesepakatan multipihak dari sekian banyak *stakeholders*.

Berdasarkan penggabungan terhadap kedua pendekatan tersebut, di bawah ini akan diuraikan secara rinci tentang berbagai isu strategis baik dalam skala nasional, Provinsi Lampung maupun Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembangunan Kabupaten Lampung Tengah lima tahun mendatang. Perbandingan dan analisa isu strategis di bawah ini menunjukkan bahwa seluruh isu strategis yang dihadapi Kabupaten Lampung Tengah juga merupakan isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Lampung.

1.8.1. Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/14106/SJ tanggal 18 Desember 2019 tentang Tindak Lanjut Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kabupaten Lampung Tengah berada pada tahap penyampaian data penyederhanaan birokrasi pada Jabatan Pengawas pada Perangkat Daerah yang menangani Rekomendasi Teknis Perizinan yang akan ditransformasikan ke Jabatan Fungsional. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk mendapatkan kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran.

1.8.2. Isu Kabupaten Lampung Tengah sebagai Lumbung

Pangan

Sebagai penghasil pangan terbesar di Provinsi Lampung dan berperan secara nasional, Lampung Tengah saat ini merupakan kabupaten yang potensial dalam penyediaan produksi dan konsumsi pangan. Selain potensi tersebut kabupaten Lampung Tengah masih berpotensi untuk dikembangkan sebagai lumbung pangan dalam aspek *on farm* dan *off farm* dari hulu sampai hilir, sehingga memberikan nilai tambah yang bisa memberikan kontribusi besar terhadap daerah dan memiliki cakupan yang lebih luas dari pemenuhan kebutuhan wilayah sampai nasional.

Perwujudan sebagai Lampung Tengah sebagai lumbung pangan adalah untuk menuju ketahanan pangan lingkup wilayah dan nasional. Ketahanan pangan merupakan salah satu fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ketahanan pangan diharapkan dapat mendukung ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan serta ketahanan wilayah maupun nasional.

Kabupaten Lampung Tengah secara keseluruhan sudah dapat memenuhi kebutuhan pangan wilayahnya atau sebagai lumbung pangan, tetapi hal ini belum meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi dan sosial bagi penduduknya. Secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan mengalami penurunan, namun masih ada 11 Desa tertinggal. Hal lain yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah

potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi. Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan kota juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Berbagai gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan sebagai faktor pemicu. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis kondisi ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.

1.8.3. Isu Ketentraman, Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat

Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Lampung Tengah yang aman, nyaman, adil, sejahtera dan berkelanjutan keragaman sosial dan budaya masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah merupakan potensi pembangunan, di sisi lain dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primordial dan partisan apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat adanya kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal

antar warga masyarakat. Konflik sosial semacam ini sering terjadi di sejumlah wilayah dengan latar belakang dan penyebabnya yang kadang kadang sangat sederhana. Di sisi lain, pemahaman dan implementasi demokrasi yang tidak komprehensif telah menjurus pada kebebasan yang tak terkendali. Sebagian masyarakat merasa bebas untuk berbuat apa saja tanpa mengindahkan hukum. Kebebasan dan unjuk kekuatan telah menjadi model dan instrumen untuk menyampaikan tuntutan, yang bila tidak dikendalikan secara hati-hati berpotensi untuk menjadi tindakan-tindakan anarkis yang sangat meresahkan dan mengganggu kehidupan normal masyarakat.

Dengan demikian kedewasaan dan menumbuhkan sikap toleransi di masyarakat Lampung Tengah menjadi sesuatu yang patut diperhatikan dalam rangka mewujudkan kenyamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam pengendalian ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat, permasalahan lainnya adalah peningkatan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

1.8.4. Isu Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

Pada aspek hukum masih banyak ditemui produk hukum yang tumpang tindih, inkonsisten dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sederajat atau lebih rendah antara satu dengan yang lainnya atau antara peraturan yang berbeda tingkatannya. Rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam mematuhi berbagai peraturan serta lemahnya peran kelembagaan

hukum di tingkat daerah menimbulkan banyak persoalan hukum.

Penegakan hukum dengan melibatkan berbagai pihak terkait sangat dibutuhkan dalam membangun Kabupaten Lampung Tengah yang aman, adil dan sejahtera. Di samping itu berbagai produk hukum yang berkaitan dengan pengembangan Lampung Tengah sebagai lumbung pangan perlu dicermati sejak awal agar tidak terjadi berbagai persoalan di atas.

Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih baik, tetapi berbagai persoalan di tata kelola pemerintah masih belum terselesaikan yang mencakup aspek hukum, kelembagaan, keuangan, kinerja aparatur, dan penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Peningkatan pelayanan publik memerlukan reformasi birokrasi yang radikal agar dapat merubah paradigma dari “memerintah” kepada “melayani”.

1.8.5. Isu Pendidikan dan Kesehatan

Pembangunan sektor pendidikan dikatakan berhasil jika indikator kinerja seperti angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka melek huruf, nilai rata-rata kelulusan serta meningkatnya daya tampung sekolah tercapai. Jika dicermati lebih jauh, angka keberhasilan pendidikan adalah jika tujuan pendidikan yang membentuk manusia seutuhnya yang beriman, bertakwa, dan cerdas. Artinya pendidikan

adalah untuk membentuk manusia berkarakter baik dan berketrampilan tinggi untuk dapat menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera.

Pendidikan bukanlah mencabut manusia dari akarnya, dari lingkungan, tetapi manusia yang dapat membangun diri dan lingkungannya. Persoalan paling mendasar di bidang pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah adalah kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai serta kurikulum yang sesuai dengan potensi lokal.

Pembangunan bidang kesehatan secara umum mengalami peningkatan, namun masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu penyelesaian dan mendapat perhatian semua pemangku kepentingan antara lain: belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, masih tinggi angka kematian ibu dan anak, keterbatasan jumlah dan jenis dokter spesialis, keterbatasan jumlah dan mutu tenaga kesehatan, serta penyebarannya yang kurang merata, prasarana dan sarana kesehatan yang belum memadai, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya, masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan, terutama tentang tumbuh kembang anak balita

menyebabkan berbagai masalah seperti: kurang gizi, dan lain-lain. Angka gizi buruk untuk Kabupaten Lampung Tengah termasuk tinggi jika dibandingkan dengan kabuapten lain di Provinsi Lampung. Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung Tahun 2019 diketahui bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 berada pada peringkat ketiga (ke-3) yaitu 70,04 setelah Bandar Lampung (77,33), Metro (76,77). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kondisi- kondisi berupa: Angka Harapan Hidup; Angka Melek Huruf; Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan sebagai paremeter yang diperhitungkan untuk Kabupaten Lampung Tengah masih lebih rendah dibandingkan ke-dua kabupaten/kota yang lain. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat potensi luas dan kondisi wilayah, jumlah penduduk dan perekonomian yang seharusnya dapat memaksimalkan posisi IPM kabupaten menjadi paling unggul dibandingkan kabupaten/kota yang lain.

1.8.6. Isu Pembangunan Berkelanjutan

Berbagai persoalan lingkungan mulai muncul di Kabupaten Lampung Tengah, seperti: krisis air pada musim kemarau, pencemaran air sungai, menurunnya lahan hijau karena konversi lahan pertanian dan polusi karena kemacetan lalu lintas dan sebagainya. Hal ini secara umum disebabkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak mengacu pada pilar-pilar

pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Selain itu, perubahan iklim merupakan fenomena alam global yang mulai memberikan dampak pada peningkatan kerentanan wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut sudah mulai dirasakan masyarakat di bidang pertanian, karena menyebabkan penurunan hasil produksi bidang pertanian, pergeseran musim tanam, dll. Peningkatan jumlah industri di Kabupaten Lampung Tengah yang cukup pesat, jika tidak dikendalikan akan menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah.

Way Seputih dan Way Sekampung adalah 2 DAS yang mengalir di Kabupaten Lampung Tengah dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air (*catchment area*) yang mendukung ketersediaan air untuk pertanian. Sebagai kawasan konservasi, kondisi kedua DAS tersebut mulai terancam menjadi kawasan budidaya. Ada beberapa kawasan hutan yang tersebar di Register 22 dan Register 59 yang dapat merupakan kawasan cadangan air, tetapi sudah mulai terancam karena terjadi pengrusakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

1.8.7. Isu Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi masalah pokok yang membutuhkan solusi cepat di kabupaten lampung tengah. Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung Tahun 2019 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Lampung Tengah menempati urutan ketujuh (12,03%) setelah Kota Metro (6,68%), Kabupaten Mesuji (7,47%), Kabupaten Tulang Bawang Barat (7,75%), Kota

Bandar Lampung (8,71%), Kabupaten Tulang Bawang (9,35%), dan Kabupaten Pringsewu (10,15%). Masalah kemiskinan merupakan permasalahan pokok dan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan harus menjadi pekerjaan yang diprioritaskan untuk dikerjakan secara holistik atau menyeluruh sehingga jumlah penduduk miskin dapat dikurangi.

1.8.8. Isu Pembangunan Perdesaan

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Indeks Desa Membangun tahun 2020 diketahui bahwa di Kabupaten Lampung Tengah terdapat 11 desa tertinggal, 207 desa berkembang dan 83 desa maju. Pembangunan perdesaan di Kabupaten Lampung Tengah perlu mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah Kabupaten karena masih terdapat desa tertinggal dan kurang berkembang sehingga diperlukan berbagai perlakuan pembenahan di tingkat desa secara menyeluruh dan berkelanjutan. Desa dengan status berkembang dan maju di Kabupaten Lampung Tengah memiliki proporsi yang tinggi namun masih perlu dilakukan pembenahan agar prestasi tersebut dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan.

1.8.9. Isu Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota, pada tingkat daerah kabupaten/kota,

Kota Bandar Lampung merupakan daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi selama kurun waktu 2015-2019. Sedangkan Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah selama kurun waktu yang sama. Sedangkan Kabupaten lampung tengah pada tahun 2019 berada pada peringkat keempat (ke-4) (5,46) dibawah Bandar Lampung (6,24), Metro (5,61) dan Tulang Bawang (5,48) serta berada sedikit diatas rata-rata Provinsi Lampung (5,61). Kondisi perekonomian secara makro Kabupaten Lampung Tengah semestinya dapat lebih ditingkatkan dengan mengaplikasi program-program dan kegiatan strategis dan bersifat mult *effect* sehingga selain tepat sasaran juga memiliki dampak terhadap beberapa sasaran lain. Kondisi eksisting Kabupaten Lampung Tengah yang wilayahnya banyak terdapat pengusahaan perkebunan dan peternakan skala besar, seharusnya dapat menjadi potensi yang sangat penting untuk dapat berperan sebagai pendorong perekonomian kabupaten. Terlebih lagi dengan diluncurkannya program nasional yang dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang menunjuk Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Provinsi Lampung bersama beberapa kabupaten lain. Sebagai salah satu WPPI maka Kabupaten Lampung Tengah berperan sebagai wilayah penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dan akan dilakukan pembangunan kawasan-kawasan

industri pada wilayah yang ditunjuk. Sehingga pemerintah kabupaten harus dapat mempersiapkan diri dan dapat mengidentifikasi keunggulan dan kebutuhan untuk dapat melakukan sinergi dengan rencana pemerintah pusat sebagai peluang pengembangan kabupaten di masa yang akan datang.

1.9. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah selama Tahun 2020. Capaian kinerja tersebut akan dibandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja dimungkinkan dapat diidentifikasinya sejumlah kendala dan permasalahan untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut ini.

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas/ ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi Anggaran.

Bab IV : Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

TAHUN 2020

2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH TAHUN 2016 – 2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan sistem serta pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2030, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2020, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2016-2021 sebagai acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2016-2021.

2.1.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2016 - 2021 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, maka visi pembangunan lima tahun ke depan adalah **"Lampung Tengah Sebagai Lumbung Pangan yang Aman, Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan"**. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang akan dilakukan adalah :

1. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman warga dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi, keadilan, dan keberagaman budaya.
2. Membangun dan meningkatkan infrastruktur strategis berbasis pengembangan wilayah yang terpadu.
3. Membangun ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai potensi dan kearifan lokal.
5. Mengelola fungsi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan.
6. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan prorakyat.

2.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi dan Arah kebijakan merupakan pedoman untuk pencapaian tujuan dan sasaran selama periode RPJMD

(lima tahun), serta memandu dan menjelaskan pelaksanaan strategi selama periode perencanaan yang tertuang dalam Strategi dan Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2016-2021.

Adapun Tujuan dan Sasaran dari masing-masing misi adalah sebagai berikut:

I. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman warga dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi, keadilan, dan keberagaman budaya.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Mewujudkan kondisi aman, tertib dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah:

- Menurunnya rasio angka kriminalitas.
- Meningkatnya kerukunan hidup dalam bermasyarakat. Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan melalui, strategi :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat

2. Meningkatkan wawasan kebangsaan guna menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai budaya. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah:

- Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan

pelestarian budaya. Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan melalui strategi :

1. Menjaga kelestarian situs budaya
2. Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya daerah

II. Membangun dan meningkatkan infrastruktur strategis berbasis pengembangan wilayah yang terpadu.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu:

Meningkatkan konektivitas wilayah secara terpadu.

Adapun sasaran dari tujuan ini adalah:

- Meningkatnya konektivitas wilayah secara terpadu.
- Meningkatnya kualitas jaringan irigasi
- Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat.
- Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi.

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan melalui strategi:

1. Melakukan pengelolaan jaringan jalan dan jembatan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan serta pelayanan transportasi
3. Melakukan pengelolaan jaringan irigasi
4. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak
5. Menurunkan luas kawasan kumuh
6. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih

7. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sanitasi lingkungan
8. Meningkatkan luas wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi.

III. Membangun ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri.

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah:

- Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan
- Meningkatnya kunjungan wisatawan
- Meningkatnya nilai investasi
- Menurunnya angka kemiskinan
- Meningkatnya kesempatan kerja
- Meningkatnya Kampung maju
- Meningkatnya pelayanan kepada calon transmigrasi
- Menjaga ketersediaan pangan masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan strategi seperti :

1. Meningkatkan produksi komoditas pertanian dan hortikultura.
2. Meningkatkan produksi komoditas perkebunan
3. Meningkatkan produksi komoditas peternakan
4. Meningkatkan produksi komoditas perikanan
5. Meningkatkan kualitas dan produksi industri

6. Meningkatkan usaha perdagangan
7. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi
8. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan UKM
9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pada objek wisata yang potensial
10. Meningkatkan system pelayanan perizinan satu pintu sesuai dengan SOP
11. Menurunkan jumlah penduduk miskin.
12. Meningkatkan kualitas serta perlindungan terhadap tenaga kerja
13. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kampung
14. Meningkatkan pelayanan dan pelatihan kepada calon transmigran
15. Meningkatkan ketersediaan bahan pangan.

IV. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai potensi dan kearifan lokal.

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas masyarakat. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah :

- Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk

- Meningkatnya partisipasi perempuan dan perlindungan anak
- Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga.

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan strategi seperti :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat.
2. Meningkatkan minat budaya baca masyarakat
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4. Mengendalikan pertumbuhan penduduk
5. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
6. Meningkatkan jumlah wirausaha muda
7. Meningkatkan pembinaan cabang olah raga

V. Mengelola fungsi sumber daya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah :

- Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
- meningkatnya kesiapsiagaan bencana

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan strategi seperti :

1. Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup

2. Meningkatkan pengelolaan tata ruang
3. Meningkatkan kewaspadaan dini penanggulangan bencana.

VI. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan prorakyat.

Tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan profesional. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah :

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja
- Meningkatnya kemadirian keuangan daerah
- Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan strategi seperti :

1. Meningkatkan pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Meningkatkan system Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
4. Meningkatkan manajemen pelayanan dan administrasi OPD
5. Meningkatkan system pelayanan publik

2.1.3. Program Pembangunan Daerah

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka dilakukan berbagai kebijakan dan program, diantaranya :

1. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman warga dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi, keadilan, dan keberagaman budaya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan misi 1 sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui arah kebijakan dan program, sebagai berikut :

- ***Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban dan ketentaram masyarakat,*** yang dilaksanakan melalui program:
 1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- ***Peningkatan wawasan kebangsaan guna menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,*** yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarkatan (ORMAS).
 2. Program penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah.
 3. Program pendidikan politik masyarakat.
 4. Program Mitigasi Konflik
- ***Peningkatan kelestarian situs budaya,*** yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program pengembangan nilai budaya.
- ***Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya daerah,*** yang dilaksanakan melalui program :

1. Program pengelolaan kekayaan budaya.
2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

2. Membangun dan meningkatkan infrastruktur strategis berbasis pengembangan wilayah yang terpadu. Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan misi 2 sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui arah kebijakan dan program, sebagai berikut :

- **Peningkatan pengelolaan jaringan jalan dan jembatan**, yang dilaksanakan melalui program:
 1. Program pembangunan jalan dan jembatan.
 2. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
 3. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
 5. Program Perencanaan dan Monitoring Jalan dan Jembatan
 6. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong.
- **Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan serta pelayanan transportasi**, yang dilaksanakan melalui program:
 1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 2. Program peningkatan pelayanan angkutan.
 3. Program keselamatan transportasi
 4. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

- **Peningkatan pengelolaan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi**, yang dilaksanakan melalui program:
 1. Program pembangunan turap/talud/bronjong
 2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
 3. Program operasi dan pemeliharaan irigasi.
 4. Program pengendalian banjir.
- **Peningkatan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak**, yang dilaksanakan melalui program:
 1. Program pengembangan perumahan.
- **Peningkatan pengelolaan kawasan kumuh perkotaan**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program penyediaan dan pengolahan air baku.
- **Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi lingkungan**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
- **Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sanitasi lingkungan**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
 2. Program Pengelolaan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Penerangan

- **Peningkatan luas wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi,** yang dilaksanakan melalui program:

1. Program layanan publikasi, komunikasi dan informasi.
2. Program pengelolaan komunikasi publik
3. Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi

3. Membangun ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam misi 3 sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui arah kebijakan dan program, sebagai berikut :

- **Peningkatan produksi komoditas pertanian,** yang dilaksanakan melalui program :

1. Program Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan
2. Program Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
5. Program Perencanaan Bidang Pertanian
6. Program pemberdayaan kelembagaan pertanian
7. Program pembiayaan usaha tani

8. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Usaha Pertanian, Peningkatan Nilai Tambah dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan.
9. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Usaha Pertanian, Peningkatan Nilai Tambah dan Pemasaran Hasil Pertanian Holtikultura.
- **Peningkatan produksi komoditas perkebunan, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program Program peningkatan produksi perkebunan
 2. Program peningkatan penyuluh peternakan dan perkebunan
 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan dan perkebunan
 4. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perkebunan
 5. Program Perencanaan Bidang Peternakan dan Perkebunan
 6. Program peningkatan Kapasitas Lembaga usaha Peternakan dan Perkebunan
- **Peningkatan produksi komoditas peternakan, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program peningkatan produksi hasil peternakan.
 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- **Peningkatan produksi komoditas perikanan, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan

2. Program pengembangan Perikanan Tangkap
 3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian sumber Daya Kelautan dan perikanan.
 5. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
 6. Program Peningkatan Produksi Hasil Perikanan
 7. Program Peningkatan Mutu Daya Saing Produk Hasil Perikanan.
 8. Program Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Pemberdayaan Pesisir
 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Petugas Perikanan dan Kelautan dan Kelembagaan Usaha Perikanan.
- **Peningkatan kualitas dan produksi industri**, yang dilaksanakan melalui program:
 1. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 3. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
 4. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan.
 5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
 6. Program Pengelolaan Pasar

7. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Pasar

- **Peningkatan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi**, yang dilaksanakan melalui program:

1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi.

2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Perkoperasian

- **Peningkatan kualitas sarana dan prasarana objek wisata**, yang dilaksanakan melalui program :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- **Peningkatan pelayanan perizinan dan informasi peluang investasi**, yang dilaksanakan melalui program :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

3. Program Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

4. Program Penanganan Pengaduan dan Pengembangan Data

- **Peningkatan program/kegiatan dalam upaya penurunan angka kemiskinan**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 3. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- **Peningkatan kualitas serta perlindungan terhadap tenaga kerja**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- **Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kampung.
 2. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Kampung.
 3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung.

4. Program peningkatan kapasitas aparatur kampung.

- **Peningkatan pelayanan dan pelatihan kepada calon transmigran**, yang dilaksanakan melalui program :

1. Program transmigrasi regional

- **Peningkatan ketersediaan bahan pangan**, yang dilaksanakan melalui program :

1. Program peningkatan ketahanan pangan.

2. Program Penanganan Rawan Pangan.

3. Program Peningkatan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

4. Program Pengembangan Ketersediaan dan cadangan pangan.

5. Program Pengembangan Keamanan pangan.

6. Program Pengembangan Distribusi Informasi Harga dan Pasokan Pangan.

4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Sesuai Potensi dan Kearifan Lokal.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam misi 4 sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui arah kebijakan dan program, sebagai berikut :

- **Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, yang dilaksanakan melalui program :**

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

2. Program Wajib Belajar 9 Tahun

3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

4. Program Pendidikan Non Formal
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- **Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 2. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- **Pencegahan dan pengendalian penyakit, yang dilaksanakan melalui program:**
 1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 2. Program Obat dan perbekalan kesehatan
 3. Program Pengawasan obat dan makanan
 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
 7. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 9. Program Peningkatan Sarana Kesehatan dan Obat-obatan
- **Peningkatan pelayanan Rumah Sakit, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit

2. Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit

- **Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan pelayanan dasar, yang dilaksanakan melalui program :**

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

2. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

- **Peningkatan peserta KB aktif, yang dilaksanakan melalui program :**

1. Program pelayanan kontrasepsi

2. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.

3. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

4. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

5. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.

6. Program kesehatan reproduksi remaja

7. Program pengendalian penduduk

8. Program Peningkatan Dukungan Sarana dan Prasarana Penyuluh KB

9. Program peningkatan advokasi dan KIE KB.

- **Peningkatan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, yang dilaksanakan melalui program :**

1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

2. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

3. Program peningkatan kualitas Hidup dan perlindungan perempuan

- **Peningkatkan jumlah wirausaha muda, yang dilaksanakan melalui program:**

1. Program peningkatan peran serta kepemudaan

- **Peningkatan pembinaan cabang olahraga, yang dilaksanakan melalui program :**

1. Program promosi dan peningkatan olah raga.

5. Mengelola fungsi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam misi 5 sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui arah kebijakan dan program, sebagai berikut :

- **Peningkatan pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup , yang dilaksanakan melalui program :**

1. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

2. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

3. Program Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup.

4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya alam.

5. Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

6. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

- **Pengendalian pemanfaatan ruang, yang dilaksanakan melalui program :**

1. Program perencanaan Tata Ruang
2. Program pengendalian Pemanfaatan Ruang

- **Peningkatan kewaspadaan dini dalam penanggulangan bencana, yang dilaksanakan melalui program :**

1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.
3. Program Penanggulangan Korban Bencana Alam.
4. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

6. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan prorakyat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam misi 6 sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui arah kebijakan dan program, sebagai berikut :

- **Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan, yang dilaksanakan melalui program :**

1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

- **Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, yang dilaksanakan melalui program :**

1. Program pengembangan data/informasi pembangunan.

2. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya.
 3. Program Perencanaan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam.
 4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
 5. Program perencanaan pembangunan daerah.
 6. Program Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- **Peningkatan kualitas sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.
 2. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan.
 3. Program Peningkatan kinerja instansi Pemerintah Daerah.
 4. Program pengawasan penyelenggaraan pemerintah.
 - **Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
 - **Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Anggaran Daerah.
 4. Program Peningkatan dan Pertanggungjawab Pendapatan dan Belanja Daerah.
 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah.
 6. Program Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
 7. Program Peningkatan, Pengendalian PAD dan Pengembangan TI.
 8. Program Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Rumah Makan, Pajak Hotel, BPHTB dan Sarang Burung Walet.
 9. Program Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Reklame, Air Bawah Tanah, Parkir, Hiburan dan Minerba.
- **Peningkatan manajemen pelayanan administrasi perkantoran, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program pelayanan administrasi perkantoran
 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 3. Program peningkatan disiplin aparatur
 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 5. Program pengadaan dan penataan karir pegawai.
 6. Program Pembinaan dan Fasilitasi ASN.
 - **Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, yang dilaksanakan melalui program**

1. Program penataan administrasi kependudukan
- **Peningkatan pelayanan sistem kearsipan, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program perbaikan system administrasi kearsipan.
- **Peningkatan pengelolaan perpustakaan, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program Peningkatan Layanan Informasi Perpustakaan.
 2. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
- **Peningkatan pelayanan informasi dan statistik daerah, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program pengembangan data/informasi/statistic daerah
- **Peningkatan pelayanan sistem keamanan informasi daerah, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program Pengembangan dan Peningkatan Persandian dan Keamanan data
- **Peningkatan Pelayanan administrasi kepegawaian, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program Pengembangan sumber Daya Aparatur.
- **Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program optimalisasi teknologi informasi kepegawaian.
 2. Program penelitian dan pengembangan Inovasi dan Teknologi

3. Program perkembangan kawasan Tecnopark.
 4. Program Penelitian dan Perkembangan Sosial dan Pemerintahan.
 5. Program Penelitian dan Perkembangan Ekonomi dan Pembangunan.
- **Peningkatan kapasitas Lembaga Legislatif, yang dilaksanakan melalui program:**
 1. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 - **Peningkatan pelayanan administrasi pertanahan yang dilaksanakan melalui program:**
 1. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
 - **Peningkatan pelayanan tata pemerintahan yang dilaksanakan melalui program:**
 1. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 2. Program Koordinasi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Program peningkatan kinerja kecamatan.
 4. Program pembangunan sarana dan prasarana kelurahan.
 5. Program peningkatan wawasan kebangsaan.
 - **Peningkatan pelayanan administrasi Hukum dan Peraturan Perundangan yang dilaksanakan melalui program:**
 1. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 2. Program Kesadaran dan Penegakan Hukum.

3. Program fasilitasi penyusunan perundang-undangan.

- **Peningkatan pelayanan administrasi perekonomian yang dilaksanakan melalui program:**

1. Program Pengembangan Perekonomian Daerah
2. Program Pengembangan Perusahaan Daerah.

- **Peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan melalui program:**

1. Program Pelayanan Peningkatan Religiusitas Masyarakat
2. Program Pelayanan Peningkatan Apresiasi Terhadap Masyarakat

- **Peningkatan pelayanan administrasi layanan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui program:**

1. Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik

- **Peningkatan pelayanan administrasi organisasi dan tatalaksana yang dilaksanakan melalui program:**

1. Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah.
2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Program Peningkatan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- **Peningkatan pelayanan administrasi pembangunan yang dilaksanakan melalui program:**

1. Program koordinasi, pemantauan dan evaluasi administrasi.

2. Program fasilitasi penganggaran dan pengawasan.
- **Peningkatan pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan melalui program:**
 1. Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 2. Koordinasi dan konsultasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Bupati Lampung Tengah telah menetapkan dokumen penetapan kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target yang akan dicapai pada tahun 2020.

Adapun sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target yang akan dicapai pada tahun 2020, adalah sebagai berikut :

MISI I : Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman warga dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi, keadilan dan keberagaman budaya.

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan kondisi aman, tertib dan tentram dalam kehidupan masyarakat dan Melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai budaya, meliputi :

1. Menurunnya rasio angka kriminalitas dengan indikator sasaran :
 - Rasio angka kriminalitas sebesar 4.84
2. Meningkatnya kerukunan hidup dalam bermasyarakat, dengan indikator sasaran :
 - Prosentase kasus konflik sosial sebesar 100 persen.
3. Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya dengan indikator sasaran:
 - Prosentase situs budaya yang lestari sebesar 80 persen.
 - Prosentase sanggar seni budaya yang aktif sebesar 85 persen.

MISI II : Membangun dan Meningkatkan infrastruktur strategis berbasis pengembangan wilayah yang terpadu.

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, meliputi :

1. Meningkatnya konektivitas wilayah secara terpadu, dengan indikator sasaran :
 - Prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 57.5 persen.
 - Prosentase pelayanan angkutan jalan 57.1 persen.
2. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi, dengan indikator sasaran:

- Prosentase Jaringan irigasi yang kondisinya baik 82.47 persen.
- 3. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat, dengan indikator sasaran :
 - Cakupan ketersediaan rumah layak huni 87.5 persen.
 - Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh 5 persen.
 - Persentase penduduk berakses air bersih 88 persen.
 - Persentase rumah tinggal bersanitasi 84 persen.
- 4. Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi daerah, dengan indikator sasaran :
 - Cakupan layanan telekomunikasi 75 persen.

MISI III : Membangun Ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri.

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan, meliputi:

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan, dengan indikator sasaran :
 - Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sebesar 5.04 persen.
 - Pertumbuhan ekonomi sektor industri 6.35 persen.
 - Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan 5.31 persen.
 - Prosentase peningkatan volume usaha koperasi 5 persen.
 - Prosentase peningkatan volume usaha UMKM/UKM 9 persen.

2. Meningkatnya kunjungan wisatawan dengan indikator sasaran
 - Prosentase peningkatan jumlah wisatawan 65.72 persen.
 - Rata-rata lama tinggal selama 2 hari
3. Meningkatnya nilai investasi, dengan indikator sasaran :
 - Prosentase peningkatan nilai investasi 10 persen.
4. Menurunnya angka kemiskinan, dengan indikator sasaran :
 - Angka kemiskinan 11.22 persen.
5. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan indikator sasaran :
 - Angka pengangguran terbuka 2,31 persen.
6. Meningkatnya jumlah desa cepat berkembang, dengan indikator sasaran:
 - Prosentase peningkatan jumlah desa dengan kategori cepat berkembang 6.64 persen.
7. Meningkatnya pelayanan kepada calon transmigran, dengan indikator sasaran :
 - Jumlah peserta transmigran yang diberangkatkan sebanyak 20 KK.
8. Menjaga ketersediaan pangan masyarakat, dengan indikator sasaran:
 - Rasio ketersediaan pangan utama (beras) 583.35 Kg/Perkapita.

MISI IV: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal, meliputi :

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, dengan indikator sasaran :
 - Rata-rata lama sekolah 8.26 persen.
 - Lama harapan sekolah 12.26 persen.
 - Nilai rata-rata ujian SD 76.5 persen.
 - Nilai rata-rata ujian SMP 80.85 persen.
2. Meningkatnya derajat Kesejahteraan Masyarakat, dengan indikator sasaran :
 - Usia Harapan Hidup 69.5 Tahun.
 - Angka kematian bayi 2.5 per 1000 KH.
 - Angka kematian Ibu 20 per 100.000 KH.
 - Prevalensi Stunting 13 persen.
3. Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk, dengan indikator sasaran :
 - Laju pertumbuhan penduduk 0,78 Persen
4. Meningkatnya partisipasi perempuan dan perlindungan anak, dengan indikator sasaran :
 - Indek pembangunan Gender 89,48 persen.
 - Prosentase penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak 100 persen.
5. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga, dengan indikator sasaran :
 - Prosentase peningkatan jumlah wirausahaan muda 5 persen.
 - Persentase cabor yang berprestasi 25 persen

MISI V: Mengelola fungsi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mengelola fungsi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan, meliputi :

1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan indikator sasaran:
 - Indek kualitas air 55 IKA.
 - Indek kualitas udara 77.5 IKU
 - Indek tutupan lahan 35 TL
2. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan indikator sasaran:
 - Ketataan terhadap RT/RW 80 persen.
3. Meningkatnya kesiapsiagaan bencana dengan indikator sasaran:
 - Prosentase desa siaga bencana sebesar 3,22 persen.

MISI VI : Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan prorakyat.

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan prorakyat, meliputi :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan, dengan indikator sasaran :
 - Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah adalah nilai hasil evaluasi atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Nilai B.

- Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) .
2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah, dengan indikator sasaran :
 - Prosentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah 9 persen.
 3. Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan masyarakat, dengan indikator sasaran :
 - Indek Kepuasan Masyarakat 80,93 persen.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab III ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah partisipatif yang diambil. Termasuk pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugastugas lainnya.

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja disini mencakup tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah

ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PK), adapun pengukuran tingkat pencapaian sasaran dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2020 ini merupakan laporan dari tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 - 2021. Secara umum pengukuran kinerja baru dapat dilakukan sampai pada kelompok indikator hasil (*indikator outcomes*).

Pengukuran kinerja dilakukan agar dapat diketahui kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat dinilai dan menjadi umpan balik (*feed back*) guna perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang.

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran, sekaligus menjelaskan hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran. Adapun Pengukuran kinerja pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Misi I

Pada Misi I terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja, sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi I Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020			CAPAIAN (%)
			SATUAN	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Menurunnya rasio angka kriminalitas	Rasio Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	Persen	4.84	4.19	86.67
2	Meningkatnya kerukunan hidup dalam bermasyarakat	Prosentase penurunan konflik sosial	Persen	100	100	100
3	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Prosentase Situs budaya yang lestari	Persen	80	80	100
		Prosentase Sanggar seni budaya yang aktif	Persen	85	85	100

Sasaran 1 : Menurunnya Rasio Angka Kriminalitas.

Sasaran ini dikembangkan melalui 1 (satu) program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 1.407.160.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.192.145.000

Secara umum keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran menurunnya rasio angka kriminalitas dapat dilihat dari turunnya rasio angka kriminalitas.

- Jumlah Tindak Kriminal**

Pada tahun 2020 rasio angka kriminalitas per 10.000 penduduk ditargetkan menurun sebesar 4.84 persen

dengan realisasi sebanyak 4.19 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 86.57 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan menurun menjadi 4,62 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 90.69 persen.

Sasaran 2: Meningkatnya Kerukunan Hidup Dalam Bermasyarakat

Sasaran ini dikembangkan melalui 4 (empat) program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.1.031.886.362,- dan teralialisasi sebesar Rp.996.574.859,-. Secara umum keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran meningkatnya kerukunan hidup dalam bermasyarakat dapat dilihat dari jumlah kasus konflik sosial.

• Jumlah Kasus Konflik Sosial

Pada tahun 2020 Kondisi di Kabupaten Lampung Tengah tetap kondusif dan tidak terjadi Konflik yang ditimbulkan akibat perselisihan SARA. Kondisi ini sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJM-D, sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100 persen. Kondisi ini tidak terlepas dari keberhasilan pembinaan yang dilakukan pemerintah bersamasama dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), maupun Forkompinda.

Sasaran 3: Meningkatnya Apresiasi Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Dan Pelestarian Budaya

Sasaran ini dikembangkan melalui 3 (tiga) program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.792.159.900,- dan teralisasi sebesar Rp. 637.534.100,-

Secara umum keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran Meningkatnya Apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya.

- **Prosentase Situs Budaya Yang Lestari**

Prosentase situs budaya yang lestari pada tahun 2020 ditargetkan meningkat menjadi 80 persen dengan realisasi sebesar 70 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 87.5 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan meningkat menjadi 90 persen pada akhir periode RPJMD, maka capaian kinerja tahun 2020 sebesar 77.78 persen.

- **Prosentase Sanggar Seni Budaya Yang Aktif**

Prosentase Jumlah sanggar seni dan budaya yang aktif tahun 2020 ditargetkan meningkat menjadi 85 persen dengan realisasi sebesar 80 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 94,12 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan meningkat menjadi 90 persen pada akhir periode RPJMD, maka capaian kinerja tahun 2020 sebesar 88,89 persen.

2. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Misi II

Pada Misi II terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja, sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi II Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020			CAPAIAN (%)
			SATUAN	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan konektivitas wilayah secara terpadu	Prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	57.5	56.4	98.09
		Prosentase pelayanan angkutan jalan	Persen	57.1	60	105.07
2	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	82.47	80.88	98.07
3	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	87.5	94.35	107.83
		Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	Persen	5	0.7	14

		Prosentase penduduk berakses air bersih	Persen	88	89.5	101.70
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	84	94.3	112.26
4	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi daerah	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	75	72.5	96.67

Sasaran 1: Meningkatnya Konektivitas Wilayah Secara Terpadu

Sasaran ini dikembangkan melalui 11 (sebelas) program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.139.922.738.987,- dan teralisasi sebesar Rp.123.913.970.312,- Secara umum keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur prasarana jalan dan irigasi.

- Prosentase panjang jaringan jalan dalam Kondisi baik di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 57.5 persen dengan realisasi sebesar 56.4 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98.09 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan menjadi 60,89 persen pada akhir periode RPJMD maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 baru mencapai 92.63 persen.
- Prosentase pelayanan angkutan jalan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 57.1 persen dengan realisasi sebesar

60 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 107,14 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan menjadi 57,92 persen pada akhir periode RPJMD maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 baru mencapai 103,59 persen.

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi

Sasaran ini dikembangkan melalui 4 program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.21.362.810.362,- dan terealisasi sebesar Rp.19.377.208.831,- secara umum keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran Meningkatnya kualitas jaringan irigasi.

- Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 82.47 persen dengan realisasi sebesar 80.88 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,07 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan menjadi 83,32 persen pada akhir periode RPJMD maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 baru mencapai 97.07 persen.

Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Permukiman Masyarakat

Sasaran ini dikembangkan melalui 5 program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 36.382.307.789,- dan teralisasi sebesar Rp.32.382.686.805,- Secara umum keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat.

- **Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni**

Jumlah rumah tangga yang menghuni rumah sehat/layak huni pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 87.5 persen dengan realisasi sebesar 94.35 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 107.83 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan meningkat menjadi 90 persen pada akhir periode, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 104.83 persen.

- **Prosentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh**

Jumlah prosentase penurunan luasan kawasan kumuh pada tahun 2020 ditargetkan menurun menjadi sebesar 5 persen dengan realisasi sebesar 0.7 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 14 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang

diharapkan meningkat menjadi 4,50 persen pada akhir periode, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 15.56 persen.

- **Prosentase Penduduk Berakses Air Bersih**

Prosentase penduduk berakses air bersih pada tahun 2020 ditargetkan meningkat menjadi sebesar 88 persen dengan realisasi sebesar 89.5 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 101.70 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan meningkat menjadi 91 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 99.44 persen.

- **Prosentase Rumah Tinggal Bersanitasi**

Prosentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2020 ditargetkan meningkat menjadi 84 persen dengan realisasi sebesar 94.3 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 112.26 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan meningkat menjadi 89,00 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 105.96 persen.

Sasaran 4 : Meningkatnya Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Daerah

Sasaran ini dikembangkan melalui 5 program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.9.091.026.000,- dan terealisasi sebesar Rp.9.058.479.379,-

Secara umum keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi daerah

- **Cakupan Layanan Komunikasi**

Cakupan layanan komunikasi pada tahun 2020 ditargetkan meningkat menjadi sebesar 75 persen dengan realisasi sebesar 72,5 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 96.67 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan meningkat menjadi 85 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 85,29 persen.

3. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Misi III

Pada Misi III terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja, sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi III Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020			CAPAIAN (%)
			SATUAN	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan	Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Persen	5.04	-1.03%	0
		Pertumbuhan ekonomi sektor industri	Persen	6.35	-5.04%	0
		Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	Persen	5.31	-3.82%	0
		Prosentase peningkatan volume usaha Koperasi	Persen	5	18.04	360.8
		Prosentase peningkatan volume Usaha UMKM/UKM	Persen	9	11.14	126.67
2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Prosentase peningkatan jumlah wisatawan	Persen	65.72	2.88	4.38
		Rata-rata lama tinggal (hari)	Hari	2	1	50
3	Meningkatnya nilai investasi	Prosentase peningkatan nilai investasi	Persen	10	9	90
4	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan (persen)	Persen	11.22	11.82	105.35
5	Meningkatnya kesempatan kerja	Angka Pengangguran Terbuka (persen)	Persen	2.31	4.22	182.68

6	Meningkatnya jumlah desa cepat berkembang	Prosentase jumlah desa dengan kategori cepat berkembang	Persen	69.7	68.7	98.57
7	Meningkatnya pelayanan kepada calon transmigran	Jumlah peserta transmigran yang diberangkatkan	KK	20 KK	0KK	0
8	Menjaga ketersediaan pangan masyarakat	Rasio Ketersediaan pangan utama (beras)kg/ perkapita	kg/ perkapita	583.35	315.67	54.11

Sasaran 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Ekonomi Unggulan

Sasaran ini dikembangkan melalui 37 program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.24.970.048.238,- dan terealisasi sebesar Rp.23.655.631.353,- Secara umum keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi unggulan.

- **Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian**

Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian pada tahun 2020, sementara masih digabungkan dengan sektor kehutanan dan perikanan dengan laju pertumbuhan ekonominya sebesar -1.03 persen, sehingga belum dapat diukur realisasi dari sektor pertanian yang ditargetkan sebesar 5.04 persen dan diakhir target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai 5,34 persen.

- **Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri**

Pertumbuhan ekonomi sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan mencapai 6.35 persen dengan realisasi sebesar -5.04 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 0 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai 6,65 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 0 persen .

- **Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan**

Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan pada tahun 2020 ditargetkan mencapai 5.31 persen dengan realisasi sebesar -3.82 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 0 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai 5,61 pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 0 persen.

- **Prosentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi**

Prosentase peningkatan volume usaha koperasi pada tahun 2020 ditargetkan mencapai 5 persen dengan realisasi sebesar 18.04 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 360.8 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021

yang diharapkan mencapai 6 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 300.67 persen.

- **Prosentase Peningkatan Volume Usaha UMKM/UKM**

Prosentase peningkatan volume usaha UMKM/UKM pada tahun 2020 ditargetkan 9 persen dengan realisasi sebesar 11.14 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 126.67 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai 10 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 111.4 persen.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Sasaran ini dikembangkan melalui 2 program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 4.545.784.804,- dan terealisasi sebesar Rp.4.004.078.392,-.

Secara umum keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran meningkatnya unit usaha industri kecil dan menengah.

- **Prosentase Peningkatan Jumlah Wisatawan**

Prosentase peningkatan jumlah wisatawan pada Tahun 2020 ditargetkan mencapai 65.72 persen dengan realisasi sebesar 2.88 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 4.38 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021

yang diharapkan mencapai 75,72 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 5.78 persen.

- **Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan**

Rata-rata lama tinggal wisatawan ditargetkan meningkat menjadi sebesar 2 hari dengan realisasi sebesar 1 hari atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 50 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai 3 hari pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 33,33 persen.

Sasaran 3 : Meningkatnya Nilai Investasi.

Sasaran ini dikembangkan melalui 4 (empat) program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.510.375.250,- dan teralisasi sebesar Rp.501.774.151,-.

- **Prosentase Peningkatan Nilai Investasi**

Prosentase peningkatan nilai investasi pada tahun 2020 ditargetkan 10 persendengan realisasi sebesar 9 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 90 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai 10 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 90 persen.

Sasaran 4 : Menurunnya Angka Kemiskinan

Sasaran ini dikembangkan melalui 5 program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.3.301.483.449,- dan terealisasi sebesar Rp.2.707.148.853,-.

- **Angka Kemiskinan**

Angka kemiskinan pada Tahun 2020 ditargetkan menurun menjadi sebesar 11.22 persen dengan realisasi sebesar 11.82 atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105.35 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai 10,66 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 110.88 persen.

Sasaran 5 : Meningkatnya Kesempatan Kerja.

Sasaran ini dikembangkan melalui 3 (tiga) program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.507.340.000,- dan terealisasi sebesar Rp.488.862.500,-.

- **Angka Pengangguran Terbuka**

Angka pengangguran terbuka pada tahun 2020 ditargetkan menurun menjadi sebesar 2.31 persen dengan realisasi sebesar 4.22 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 182.68 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai 2,10 persen pada

akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 200.95 persen.

Sasaran 6 : Meningkatkan Desa Cepat Berkembang.

Sasaran ini dikembangkan melalui 4 program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.1.357.611.500,- dan terealisasi sebesar Rp.1.260.938.570,-.

- **Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Dengan Kategori Cepat Berkembang**

Persentase peningkatan jumlah desa dengan kategori cepat berkembang pada tahun 2020 ditargetkan 69.7 persen dengan realisasi sebesar 68.7 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98.57 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai 83.1 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 82.67 persen.

Sasaran 7: Meningkatkan Pelayanan Kepada Calon Transmigran.

Sasaran ini dikembangkan melalui 1 (satu) program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.106.806.600,- dan terealisasi sebesar Rp.95.550.000,-.

- **Jumlah Penduduk Yang Mengikuti Program Transmigrasi Ke Luar Lampung Tengah**

Jumlah penduduk yang mengikuti program transmigrasi ke luar Lampung Tengah pada Tahun 2020 ditargetkan 20 KK dengan realisasi sebesar 0 KK atau dengan tingkat capaian

kinerja sebesar 0 persen. Hal ini dikarenakan adanya peralihan dana program untuk penanganan Covid-19. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai 20 KK pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 0 persen.

Sasaran 8 : Menjaga Ketersediaan Pangan Masyarakat

Sasaran ini dikembangkan melalui 5 (lima) program dengan jumlah alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 1.215.095.125,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.133.321.960,-.

- **Rasio Ketersediaan Pangan**

Rasio ketersediaan pangan pada Tahun 2020 ditargetkan 383.35 kg/penduduk/tahun dengan realisasi sebesar 315.67 kg/penduduk/tahun persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 54.11 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai 641,70 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 49.19 persen.

4. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Misi IV

Pada Misi IV terdapat 5 (lima) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja, sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi IV Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020			CAPAIAN (%)
			SATUAN	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (tahun)	Tahun	8.26	8.26	100
		Lama harapan sekolah (tahun)	Tahun	12.26	12.26	100
		Nilai rata-rata ujian SD	Nilai	76.5	76.5	100
		Nilai rata-rata ujian SMP	Nilai	80.85	81.25	100.49
2	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	Tahun	69.5	69.84	100.49
		Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)	Per 1000 Kelahiran Hidup	2.5	4.3	172
		Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	20	22	110
		Prevalensi Stunting (Persen)	Persen	13	16.84	129.54
3	Meningkatnya pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	Persen	0.78	0.73	93.59
4	Meningkatnya partisipasi perempuan dan perlindungan anak	Indek Pembangunan Gender (persen)	Persen	89.48	89.40	99.91

		Prosentase penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100	100	100
5	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Prosentase peningkatan jumlah wirausahaan muda	Persen	5	0	0
		Prosentase cabor yang berprestasi	Persen	25	0	0

Sasaran1: Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan

Sasaran ini dikembangkan melalui 6 (enam) program dengan jumlah alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.235.404.504.050,- dan terealisasi sebesar Rp.207.547.729.090,-.

• Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah pada Tahun 2020 ditargetkan 8,26 dengan realisasi sebesar 8,26 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai 8,52 Tahun pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 96.95 persen.

- **Lama Harapan Sekolah**

Lama harapan sekolah pada Tahun 2020 ditargetkan 12,26 persen dengan realisasi sebesar 12,26 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai 12,27 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 99,92 persen.

- **Nilai Rata-Rata Ujian SD**

Nilai rata-rata ujian SD pada Tahun 2020 ditargetkan 76.5 persen dengan realisasi sebesar 76.5 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai 77,00 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 99.35 persen.

- **Nilai Rata-Rata Ujian SMP**

Nilai rata-rata ujian SMP pada Tahun 2020 ditargetkan 80,85 persen dengan realisasi sebesar 81.25 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,49 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai 80,90 persen pada akhir periode

RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 100,43 persen.

Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Sasaran ini dikembangkan melalui 14 (empat belas) program dengan jumlah alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.172.358.967.050,93,- dan terealisasi sebesar Rp.123.015.020.443,88,-.

- **Usia Harapan Hidup**

Usia Harapan hidup pada Tahun 2020 ditargetkan 69,5 tahun. Realisasi sebesar 69,84 tahun atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100.49 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai 69,80 tahun pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 100.06 persen.

- **Angka Kematian Bayi**

Angka kematian bayi pada tahun 2020 ditargetkan menurun menjadi sebesar 2.5 per 1000 kel.Hidup dengan realisasi 4.3 per 1000 kelahiran hidup.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan menurun menjadi 2 per 1000 keluarga hidup kasus pada akhir periode RPJMD, namun demikian apabila dibandingkan dengan target nasional yang sebesar 23 per

1000 kelahiran hidup maka angka kematian bayi di Kabupaten Lampung Tengah masih lebih rendah.

- **Angka Kematian Ibu Melahirkan**

Angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 20 per 100.000 kelahiran hidup dengan realisasi 22 per 100.000 kelahiran hidup.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan menurun menjadi 10 per 100.000 keluarga hidup pada akhir periode RPJMD.

- **Prevalensi Stunting (Jumlah Balita Penderita Stunting)**

Prevalensi stunting pada tahun 2020 ditargetkan menurun menjadi sebesar 13 persen dengan realisasi 16.84 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 129.54 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan menurun menjadi 10 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 168,4 persen.

Sasaran 3: Meningkatnya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk.

Sasaran ini dikembangkan melalui 8 (delapan) program dengan jumlah alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 7.621.053.491,- dan terealisasi sebesar Rp.4.674.009.799,-.

Angka laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 0,78 persen dengan realisasi sebesar 0,73 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 93.59 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan menurun menjadi 0.75 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 104 persen.

Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Sasaran ini dikembangkan melalui 4 program dengan jumlah alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.478.160.850,- dan terealisasi sebesar Rp.474.767

- **Indek Pembangunan Gender**

Indek Pembangunan Gender pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 89,40 persen dengan realisasi sebesar 89,40 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan menjadi 89,56 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 99,82 persen.

- **Prosentase Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak**

Prosentase penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 100 persen dengan realisasi sebesar 100 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan menjadi 100 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 100 persen.

Sasaran 5 : Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan Dan Prestasi Olahraga.

Sasaran ini di kembangkan melalui 3 program dengan jumlah alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 1.186.821.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 874.476.260.152,-

- **Prosentase Peningkatan Jumlah Wirausahawan Muda**

Prosentase peningkatan jumlah wirausahawan muda pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5 persen dengan realisasi sebesar 3 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 60 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan menjadi 5 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 60 persen.

- **Prosentase Cabang Olahraga Yang Berprestasi**

Prosentase cabang olahraga yang berprestasi pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 25 persen dengan realisasi sebesar 0 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 0 persen. Hal ini dikarenakan situasi pandemic *Covid-19* banyak penyelenggaraan dan *event* olahraga tidak dilaksanakan, sehingga Kabupaten Lampung Tengah tidak mengirimkan utusan dan perwakilan untuk tingkat Nasional maupun Internasional.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan menjadi 30 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 0 persen.

5. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Misi V

Pada Misi V terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja, sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi V Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020			CAPAIAN (%)
			SATUAN	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Indek Kualitas Air (IKA)	IKA	52	73.58	133.78

		Indek Kualitas Udara (IKU)	IKU	77.5	84.35	108.84
		Indek Tutupan Lahan (TTL)	TTL	35	30.13	86.37
2	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap RTRW (persen)	Persen	80	73.4	91.75
3	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Prosentase desa siaga bencana	Persen	3.22	3.22	100

Sasaran 1: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.

Sasaran ini dikembangkan melalui 6 (enam) program dengan jumlah alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.15.277.612.000,- dan terealisasi sebesar Rp.14.123.328.304,-

- **Indeks Kualitas Air**

Indeks kualitas air di Tahun 2020 ditargetkan 55 IKA dengan realisasi sebesar 73.58 IKA atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 133.78 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai 58 IKA pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 126.86 persen.

- **Indeks Kualitas Udara**

Indeks kualitas udara di Tahun 2020 ditargetkan 77.5 IKU dengan realisasi sebesar 84.35 IKU atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 108.84 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai 80 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 105.43 persen.

- **Indeks Tutupan Lahan**

Indeks tutupan lahan di Tahun 2020 ditargetkan 35 TL dengan realisasi sebesar 30,13 TL atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 86.37 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai 40 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 75.32 persen.

Sasaran 2: Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Sasaran ini dikembangkan melalui 2 (dua) program dengan jumlah lokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.593.083.520,- dan terealisasi sebesar Rp.415.339.000,-

- **Ketaatan Terhadap RT RW**

Ketaatan terhadap RT RW di Tahun 2020 ditargetkan 80 persen dengan realisasi sebesar 73,4 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 91.75 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai

82 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 89,51 persen.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana.

Sasaran ini dikembangkan melalui 3 (tiga) program dengan jumlah alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.10.926.619.723,- dan terealisasi sebesar Rp.846.657.823,-

- **Prosentase Desa Siaga Bencana**

Prosentase desa siaga bencana di Tahun 2020 ditargetkan 3.22 persen dengan realisasi sebesar 3.22 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai 3.22 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 100 persen.

6. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Misi VI

Pada Misi VI terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja, sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi VI Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020			CAPAIAN (%)
			SATUAN	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Kategori)	Nilai	B	B	100
		Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Opini)	WTP	WTP	WTP	100
2	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Prosentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	9	5.9	65.56
3	Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Persen	80,93	85.90	106.14

Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan.

Sasaran ini dikembangkan melalui 11 (sebelas) program dengan jumlah alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.10.018.314.724,- dan terealisasi sebesar Rp.9.069.500.459,-.

- **Nilai Akuntabilitas Kinerja**

Nilai akuntabilitas kinerja adalah nilai hasil evaluasi atas laporan kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Tahun 2020 ditargetkan nilai B dengan realisasi nilai B atau dengan nilai capaian kinerja 100 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai A pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 80 persen.

- **Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2020 ditargetkan mendapatkan WTP dengan realisasi WTP atau dengan nilai capaian kinerja 100 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai WTP pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 100 persen.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Sasaran ini dikembangkan melalui 9 (Sembilan) program, dengan jumlah alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.9.540.072.664,- dan terealisasi sebesar Rp.8.774.842.502,-.

Secara umum keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pada sasaran pencapaian sasaran meningkatnya kemandirian keuangan daerah

- **Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah**
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 9 persen dengan realisasi 5.9 persen atau dengan nilai capaian kinerja 65.56 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai 10 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 59 persen.

Sasaran 3: Meningkatkan Tingkat Kepuasan Pelayanan Masyarakat

Sasaran ini dikembangkan melalui 48 (empat puluh delapan) program, dengan jumlah alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.243.158.674.139,- dan terealisasi sebesar Rp.215.099.574.497,-.

Secara umum keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan masyarakat.

- **Indek Kepuasan Masyarakat**

Indek kepuasan masyarakat pada tahun 2020 ditargetkan mendapatkan nilai 80,93 dengan realisasi nilai 85,90 atau dengan nilai capaian kinerja 106,14 persen. Apabila

dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai 81,26 pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 105,71 persen.

3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Untuk melihat perkembangan capaian sasaran tahun 2020 terhadap capaian sasaran tahun 2019 dan 2018, maka dilakukan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan tahun 2019 dan 2018. Berikut disajikan dalam tabel rekapitulasi perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 dan 2018.

Tabel 3.7

Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi I

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2018	CAPAIAN KINERJA 2019	CAPAIAN KINERJA 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menurunnya rasio angka kriminalitas	Rasio Angka kriminalitas	80%	83,99 %	86.57%
2	Meningkatnya kerukunan hidup dalam bermasyarakat	Prosentase penurunan konflik sosial	100%	100%	100%
3	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Prosentase Situs budaya yang lestari	100%	100%	100%
		Prosentase Sanggar seni budaya yang aktif	80%	94,11%	94.12%
Rata-Rata Capaian			90%	94.53%	95.17

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Misi I dari tahun 2018 sampai dengan 2020 terjadi kenaikan setiap tahunnya, hal ini membuktikan bahwa capaian kinerja pada Misi I dalam kategori sangat baik.

Tabel 3.8

Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2018	CAPAIAN KINERJA 2019	CAPAIAN KINERJA 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan konektivitas wilayah secara terpadu	Prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	107%	114.68%	98.09%
		Prosentase pelayanan angkutan jalan	96.42%	107.14%	105.08%
2	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	97.5%	98.47%	98.07%
3	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	94.11%	105.53%	107.83%
		Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	81.81%	20.53%	14%
		Prosentase penduduk berakses air bersih	96.34%	103.67%	101.70%
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	93.24%	117.87%	112.26%
4	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi daerah	Cakupan Layanan Telekomunikasi	81.81%	111.54%	96.67%
Rata-Rata Capaian			93.53%	103.99%	91.71%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Misi II dari tahun 2018 sampai dengan 2020 terjadi kenaikan setiap tahunnya, hal ini membuktikan bahwa capaian kinerja pada Misi II dalam kategori sangat baik.

Tabel 3.9

Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi III

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2018	CAPAIAN KINERJA 2019	CAPAIAN KINERJA 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan	Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	4.06%	2.03%	0%
		Pertumbuhan ekonomi sektor industri	100%	143.83%	0%
		Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	100%	130.2%	0%
		Prosentase peningkatan volume usaha Koperasi	66.66%	88.75%	360.8%
		Prosentase peningkatan volume Usaha UMKM/UKM	85.71%	123.38%	126.67%
2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Prosentase peningkatan jumlah wisatawan	71.42%	179.62%	4.38
		Rata-rata lama tinggal	100%	100%	50%
3	Meningkatnya nilai investasi	Prosentase peningkatan nilai investasi	50%	90%	90%
4	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan (persen)	83.33	102.27%	105.35%

5	Meningkatnya kesempatan kerja	Angka Pengangguran Terbuka (persen)	66.66%	100%	182.68%
6	Meningkatnya jumlah desa cepat berkembang	Prosentase jumlah desa dengan kategori cepat berkembang	66.66%	97.77%	98.57%
7	Meningkatnya pelayanan kepada calon transmigran	Jumlah peserta transmigran yang diberangkatkan	66.66%	65%	0%
8	Menjaga ketersediaan pangan masyarakat	Rasio Ketersediaan pangan utama (beras)kg/ perkapita	90.90%	69.47%	54.11%
Rata-Rata Capaian			73.23%	99.41%	82.50%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Misi III dari tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2020 mengalami penurunan, dengan capaian kinerja dalam kategori baik. .

Tabel 3.10

Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi IV

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2018	CAPAIAN KINERJA 2019	CAPAIAN KINERJA 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (tahun)	100%	100.37%	100%
		Lama harapan sekolah (tahun)	100%	100%	100%
		Nilai rata-rata ujian SD	97.33%	100%	100%
		Nilai rata-rata ujian SMP	100%	100.25	100.49%
2	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	69.35%	100%	100.49%

		Angka Kematian Bayi (Per 1000)	75%	121%	172%
		Angka Kematian Ibu (Per 100.000)	80%	56.67%	110%
		Prevalensi Stunting (Persen)	85.71%	92.33%	129.54%
3	Meningkatnya pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	85.71%	98.76%	93.59%
4	Meningkatnya partisipasi perempuan dan perlindungan anak	Indek Pembangunan Gender (persen)	100%	100%	99.91%
		Prosentase penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak	80.88%	100%	100%
5	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Prosentase peningkatan jumlah wirausahaan muda	75%	60%	60%
		Persentase cabor yang berprestasi	92.85%	37.33%	0%
Rata-Rata Capaian			87.83%	89.74%	97.38%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Misi IV dari tahun 2018 sampai dengan 2020 terjadi kenaikan setiap tahunnya, hal ini membuktikan bahwa capaian kinerja pada Misi IV dalam kategori sangat baik.

Tabel 3.11

Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi V

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2018	CAPAIAN KINERJA 2019	CAPAIAN KINERJA 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Indek Kualitas Air (IKA)	93.22%	137.46%	133.78%
		Indek Kualitas Udara (IKU)	89.61%	115.13%	108.84%
		Indek Tutupan Lahan (TTL)	72.91%	100.43%	86.57%
2	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap RTRW (persen)	84.26%	95.32%	73.4%
3	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Prosentase desa siaga bencana	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian			88%	105.67%	100.52%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Misi V dari tahun 2018 sampai dengan 2020 terjadi kenaikan setiap tahunnya, hal ini membuktikan bahwa capaian kinerja pada Misi V dalam kategori sangat baik.

Tabel 3.12

Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi VI

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2018	CAPAIAN KINERJA 2019	CAPAIAN KINERJA 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Kategori)	100%	100%	100%

		Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Opini)	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Prosentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	216%	94.03%	65.56%
3	Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (Nilai)	100%	106.27%	106.14%
Rata-Rata Capaian			129%	100.08%	92.93%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Misi VI dari tahun 2018 sampai dengan 2020 terjadi kenaikan setiap tahunnya, hal ini membuktikan bahwa capaian kinerja pada Misi VI dalam kategori sangat baik.

3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Kinerja Yang Telah Dicapai

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left\{ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right\}$$

Pada tahun 2020 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.806.300.530.908,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp.953.068.518.077,53,-. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 0.03%. Persentase

efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2020 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya, namun bila dilihat pada level kegiatan Nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan. Untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas anggaran terhadap capaian misi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Per Sasaran Strategis Tahun 2020

MISI	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi I : Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman warga dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi, keadilan, dan keberagaman budaya.	Menurunnya rasio angka kriminalitas	86.57	1.192.145.000	84.72
	Meningkatnya kerukunan hidup dalam bermasyarakat	100	996.574.859	85.24
	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	151.27	637.534.100	83.22
Misi II: Membangun dan meningkatkan infrastruktur strategis berbasis	Meningkatkan konektivitas wilayah secara terpadu	101.59	123.913.970.312	97.56
	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	98.07	19.377.208.831	91.95

pengembangan wilayah yang terpadu	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	83.95	32.382.686.805	88.06
	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi daerah	96.67	9.058.479.379	99.86
Misi III: Membangun ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri.	Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan	97.49	23.655.631.353	100.11
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	27.19	4.004.078.392	62.19
	Meningkatnya nilai investasi	90	501.774.151	98.97
	Menurunnya angka kemiskinan	105.35%	2.707.148.853	78.87
	Meningkatnya kesempatan kerja	182.68	488.862.500	97.36
	Meningkatnya jumlah desa cepat berkembang	98.57	1.269.938.570	90.35
	Meningkatnya pelayanan kepada calon transmigran	0	95.550.000	89.46
	Menjaga ketersediaan pangan masyarakat	54.11	1.133.321.960	90.09
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	100.12	207.547.729.090	94
Misi IV: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai potensi dan kearifan lokal	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	128	123.015.020.443,88	82.32
	Meningkatnya pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	93.59	4.674.009.7999	107.47

	Meningkatnya partisipasi perempuan dan perlindungan anak	99.96	474.767.475	98.75
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	30	874.476.260.152	83.28
Misi V: Mengelola fungsi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	109.66	14.123.328.304	86.61
	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	91.75	415.339.000	74.24
	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	100	846.657.823	48.75
Misi VI: Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan prorakyat.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	100	9.069.500.459	94.41
	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	65.56	8.774.842.502	99.82
	Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan masyarakat	106.14	215.099.574.497	86.30

Berdasarkan analisis dari tabel di atas ada indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran yang tinggi, namun pencapaian target untuk indikator sasaran dapat terealisasi sepenuhnya bahkan melampaui target yang telah ditentukan. Hanya saja pada misi III dan misi IV terdapat indikator yang capaian kinerjanya jauh dari target yang ditentukan, yaitu Meningkatkan kunjungan wisatawan, Meningkatkan pelayanan kepada calon

transmigran, Menjaga ketersediaan pangan masyarakat, Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga. Hal ini disebabkan faktor pandemi *covid-19*, sehingga mempengaruhi capaian kinerja pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, namun hal ini tidak mempengaruhi hasil kinerja dari Kabupaten yang masih dalam kategori capaian indikator sangat tinggi dengan rata-rata capaian kinerja 91.48% dan jika dibandingkan dengan realisasi anggaran 84.60%, maka hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.14
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dikaitkan Dengan Capaian Kinerja Tahun 2020

MISI	JUMLAH INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi I : Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman warga dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi, keadilan, dan keberagaman budaya.	4	112.61	84.39	28.22
Misi II: Membangun dan meningkatkan infrastruktur strategis berbasis pengembangan wilayah yang terpadu	8	95.07	94.36	0.17
Misi III: Membangun ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri.	13	60.11	88.43	-28.32

Misi IV: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai potensi dan kearifan lokal	13	90.33	93.164	-2.83
Misi V: Mengelola fungsi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan	5	100.47	69.87	30.60
Misi VI: Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan prorakyat.	4	90.37	93.51	-2.94

3.4. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan capaian kinerja dari semua sasaran strategis ini sebanyak 194 program dan 47 indikator.

1. Pada Misi I terdapat 8 (delapan) program dan 4 (empat) indikator kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 95.17%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada misi I dalam kategori sangat baik, dari 8 (delapan) program tersebut semuanya berperan penting dalam mendukung pencapaian target kinerja dan ini menunjukkan bahwa keamanan, ketertiban dan ketentraman warga dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi, keadilan dan keberagaman di Kabupaten Lampung Tengah semakin meningkat.
2. Pada Misi II terdapat 23 (dua puluh tiga) program dan 8 (delapan) indikator kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 91.71%. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja beberapa program yang mendukung misi II, yaitu:

- Di tahun 2020 kondisi jalan mantap di Kabupaten Lampung Tengah sepanjang 757.70 km dari 1.343,33 km total panjang jalan di Kabupaten Lampung Tengah.
- Di tahun Jaringan irigasi Primer yang kondisinya baik sepanjang 563.220 meter, dibandingkan dengan tahun 2019 kondisinya 563.220 meter, jaringan irigasi Sekunder yang kondisinya baik sepanjang 387.660 meter, dibandingkan dengan tahun 2019 kondisinya 387.660 meter, jaringan irigasi Tersier yang kondisinya baik sepanjang 696.441 meter, dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan 6,66 persen.
- Jumlah sawah yang mendapatkan pelayanan air irigasi seluas 79.696,125 ha, atau 12.04 persen dari luas sawah yang ada yaitu sebesar 86.745,125 ha. Kondisi ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 yang hanya mengairi seluas 69.241,125 ha atau 79,83 persen.
- Pada tahun 2020 jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih sebanyak 304.063 rumah tangga atau sebesar 89,55 persen dari jumlah rumah tangga yang ada yaitu sebesar 339.563 rumah tangga. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,43 persen, dibanding tahun 2019 yang sebesar 88,12 persen.
- Pada tahun 2020 jumlah rumah tangga yang menghuni rumah sehat (rumah layak huni) sebanyak 320,377 rumah tangga atau sebesar 94,35 persen dari jumlah rumah tangga yang ada. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,81 persen, dibanding pada tahun 2019 yang sebesar 85,54 persen.

- Pada tahun 2020 jumlah rumah tangga yang menggunakan jamban sehat sebanyak 320,377 rumah tangga atau sebesar 94,35 persen dari jumlah rumah tangga yang ada yaitu sebesar 339.563 rumah tangga. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,81 persen, dibanding tahun 2019 yang sebesar 85,54 persen.
 - Pada tahun 2020 jumlah Rumah tangga pengguna listrik sebanyak 320.207 rumah tangga atau sebesar 94,30 persen dari jumlah rumah tangga yang ada.
 - Pada tahun 2020 Luas Lingkungan Permukiman Kumuh sebanyak 8,42 Ha atau sebesar 1,52 persen dari Luasan Lingkungan Permukiman yang ada yaitu sebesar 553,74 Ha. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang sebesar 1,79 persen.
3. Pada Misi III terdapat 62 (enam puluh dua) program dan 13 (tiga belas) indikator kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 82.50%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada misi III dalam kategori baik. Pada Misi III ada 7 (tujuh) capaian kinerja yang mengalami penurunan, seperti pada indikator pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan; indikator peningkatan jumlah wisatawan, lama tinggal; indikator peserta transmigrasi yang diberangkatkan dan indikator rasio ketersediaan pangan utama (beras). Faktor penyebab utamanya adalah pandemi *Covid-19* , sehingga hal ini sangat berparuh pada pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industry di Kabupaten Lampung Tengah.

4. Pada Misi IV terdapat 33 (tiga puluh tiga) program dan 13 (tiga belas) indikator kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 97.38%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada misi I dalam kategori sangat baik. Dari 13 indikator kinerja hanya satu indikator yang tidak terealisasi, yaitu prosentase cabang olahraga yang berprestasi. Pada tahun 2020 Kabupaten Lampung Tengah tidak mengirimkan utusan dan perwakilan untuk tingkat Nasional maupun Internasional. Hal ini dikarenakan situasi pandemic *Covid-19* sehingga banyak penyelenggaraan dan event olahraga tidak dilaksanakan.
5. Pada Misi V terdapat 11 (sebelas) program dan 5 (lima) indikator kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100.52%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada misi V dalam kategori sangat baik dan mendukung keberhasilan pengelolaan fungsi sumber daya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan.
6. Pada Misi VI terdapat 58 (lima puluh delapan) program dan 4 (empat) indikator kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 92.93%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada misi VI dalam kategori sangat baik. Pada misi VI program pada indikator prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang memiliki capaian yang rendah dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar 65.56%, dan pada tahun 2019 sebesar 94.03%. Faktor utama penyebabnya adalah pandemic *Covid-19* yang berimbas pada PAD kabupaten.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan tolak ukur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Tengah 2016-2021. Sangat disadari laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Penyempurnaan laporan dimasa yang akan datang akan terus dilakukan agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Secara umum Pencapaian Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahun 2020 berdasarkan pengukuran kinerja sasaran pada tingkat hasil (*outcomes*) telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keberhasilan pencapaian sasaran ditunjukkan dari pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing sasaran serta ditunjang oleh data-data indikator kinerja makro dari masing-masing sasaran.

Berdasarkan Akuntabilitas Keuangan, alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran juga secara umum dapat terealisasi sesuai

dengan target atau tingkat capaian yang diharapkan. Upaya pencapaian sasaran sesuai Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2020, telah diupayakan secara optimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, namun demikian berbagai permasalahan/kendala sering terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga perlu diupayakan jalan keluar/solusi untuk perbaikan pada tahun-tahun berikutnya.

Kiranya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020 ini, dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan dalam upaya peningkatan kinerja. Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Perfomance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

4.2. SARAN-SARAN

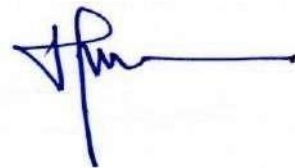
Dari permasalahan yang dihadapi dan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang, maka perlu disarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemantauan atas pencapaian kinerja dilevel Perangkat Daerah;
2. Melakukan evaluasi terhadap hasil dan implementasi program, sehingga terjadi keselarasan antara kegiatan, hasil

program dengan sasaran strategis pada setiap Perangkat Daerah;

3. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dalam menerapkan manajemen kinerja melalui pengintegrasian system perencanaan kinerja dan penganggaran serta membangun mekanisme sistem pengukuran kinerja organisasi dan individu, sebagai sarana pemantauan kinerja oleh pimpinan dan juga sebagai pemberian *reward* and *punishment*;
4. Perlu adanya peningkatan kemampuan dan pengetahuan aparatur di Kabupaten Lampung Tengah dengan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada pohon kinerja, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk prioritas pembangunan dan memiliki daya ungkit yang efektif dalam pencapaian kinerja serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



MUSA AHMAD

LAMPIRAN

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MISI I

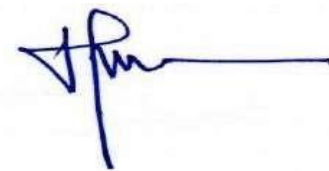
KABUPATEN : LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Menurunnya rasio angka kriminalitas	Rasio Angka kriminalitas	4.84	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,407,160,000	1,192,145,000	84.72
2 Meningkatnya kerukunan hidup dalam bermasyarakat	Prosentase penurunan konflik sosial	100	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)	93,847,668	56,975,200	60.71
			Program Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	95,060,000	78,560,000	82.64
			Program pendidikan politik masyarakat	600,041,600	589,702,565	98.28
			Program Mitigasi Konflik	242,937,094	241,337,094	99.34

3	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Prosentase Situs budaya yang lestari	80	Program Pengembangan Nilai Budaya	296,104,000	161,943,200	54.69
		Prosentase Sanggar seni budaya yang aktif	85	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	413,002,900	392,610,700	95.06
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	83,053,000	82,980,200	99.91
		JUMLAH PROGRAM		Program : 8	3,231,206,262	2,796,253,959	86.54
		JUMLAH ANGGARAN					

Gunung Sugih, 29 Maret 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH



MUSA AHMAD

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MISI II

KABUPATEN : LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Meningkatkan konektivitas wilayah secara terpadu	Prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	57.5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	33,644,046,528	30,081,979,502	89.41
	Prosentase pelayanan angkutan jalan	57.1	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	67,399,827,294	55,906,589,393	82.95
			Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.	19,555,584,113	19,420,870,310	99.31
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	2,670,110,500	2,608,482,000	97.69
			Program Perencanaan dan Monitoring Jalan dan Jembatan	4,901,350,271	4,786,792,015	97.66
			Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong.	10,906,482,136	10,303,315,570	94.47

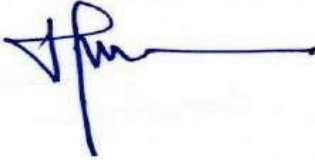
			Program Pengendalian Teknis dan Uji Mutu Konstruksi Jalan dan Jembatan	63,883,145	63,883,145	100.00	
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	175,000,000	174,132,200	99.50	
			Pogram peningkatan pelayanan angkutan	303,225,000	294,919,427	97.26	
			Program Keselamatan Transportasi	33,700,000	6,200,000	18.40	
			Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	269,530,000	266,806,750	98.99	
2	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	82.47	Program pembangunan turap/talud/bronjong	4,398,058,628	4,130,953,771.67	93.93
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	4,074,419,285	3,473,396,493.09	85.25	
			Program Operasi dan Pemeliharaan Irigasi	10,883,092,449	9,792,831,642.06	89.98	
			Program Pengendalian Banjir	2,007,240,000	1,980,026,924.25	98.64	

3	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	87.5	Program Pengembangan Perumahan	6,077,530,000	5,485,445,398.50	90.26
		Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	5	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	1,035,172,050	791,914,899	76.50
		Prosentase penduduk berakses air bersih	88	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	19,441,157,088.60	16,962,339,502.56	87.25
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	84	Program Pengelolaan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Penerangan	4,716,548,650	4,539,703,929.99	96.25
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	5,111,900,000	4,603,283,074.52	90.05
4	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi daerah	Cakupan Layanan Telekomunikasi	75	Program Layanan Publikasi, Komunikasi dan Informasi	7,667,291,000	7,647,806,909	99.75
				Program Pengelolaan Komunikasi Publik	21,619,000	21,127,570	97.73
				Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	1,402,116,000	1,389,544,900	99.10
	JUMLAH PROGRAM			Program : 23	206,758,883,138	184,732,345,327	

					89.35
	JUMLAH ANGGARAN				

Gunung Sugih, 29 Maret 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH



MUSA AHMAD

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MISI III

KABUPATEN : LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan	Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	5.04	Program Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan	714,954,040	708,767,040	99.13
	Pertumbuhan ekonomi sektor industri	6.35	Program Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura	317,427,997	315,137,497	99.28
	Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	5.31	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	244,265,000	241,828,700	99.00
	Prosentase peningkatan volume usaha Koperasi	5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	2,339,534,470	2,218,125,870	94.81
	Prosentase peningkatan volume Usaha UMKM/UKM	9	Program Perencanaan Bidang Pertanian	4,362,500	4,362,000	99.99
			Program pemberdayaan kelembagaan pertanian	2,633,441,754	2,313,079,172	87.83

			Program Pembiayaan Usaha tani	83,740,000	83,740,000	100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Usaha Pertanian, Peningkatan Nilai Tambah dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan	2,175,000	2,175,000	100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Usaha Pertanian, Peningkatan Nilai Tambah dan Pemasaran Hasil Pertanian Holtikultura	14,972,400	14,972,400	100.00
			Program peningkatan produksi perkebunan	356,463,199	353,397,724	99.14
			Program peningkatan penyuluh peternakan dan perkebunan	17,895,000	17,895,000	100.00
			Program peningkatan produksi hasil peternakan	392,956,878	389,939,400	99.23
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan dan perkebunan	89,486,000	88,293,700	98.67
			Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perkebunan	25,305,000	25,305,000	100.00
			Program Perencanaan Bidang Peternakan dan Perkebunan	6,897,500	6,897,500	100.00

			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	342,164,200	340,867,950	99.62
			Program peningkatan Kapasitas Lembaga usaha Peternakan dan Perkebunan	14,925,000	14,925,000	100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan	1,068,240,000	954,613,000	89.36
			Program pengembangan Perikanan Tangkap	100,029,000	99,919,000	99.89
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan	153,608,000	151,413,000	98.57
			Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian sumber Daya Kelautan dan perikanan	17,933,000	13,933,000	77.69
			Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	14,429,500	14,369,500	99.58
			Program Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	93,870,000	93,237,270	99.33
			Program Peningkatan Mutu Daya Saing Produk Hasil Perikanan	110,725,600	109,550,000	98.94

			Program Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Pemberdayaan Pesisir	53,058,000	52,988,000	99.87
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Petugas Perikanan dan Kelautan dan Kelembagaan Usaha Perikanan	24,800,000	24,800,000	100.00
			Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	119,000,000	116,145,000	97.60
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	53,160,000	52,715,000	99.16
			Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	49,825,000	48,270,000	96.88
			Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	20,076,000	20,004,600	99.64
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1,775,599,500	1,542,270,550	86.86
			Program Pengelolaan Pasar	110,318,500	109,877,800	99.60
			Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Pasar	173,536,200	172,794,200	99.57
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi	37,305,000	35,194,750	94.34

			Program Peningkatan Pengembangan Pengawasan Koperasi	35,150,000	35,150,000	100.00	
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	12,864,671,500	12,385,908,730	96.28	
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	76,389,500	73,398,000	96.08	
			Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Perkoperasian	417,358,000	409,371,000	98.09	
2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Prosentase peningkatan jumlah wisatawan	65.72	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	115,942,000	40,479,000	34.91
	Rata-rata lama tinggal (hari)	2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4,429,842,804	3,963,599,391.95	89.47	
3	Meningkatnya nilai investasi	Prosentase peningkatan nilai investasi	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	29,490,000	28,944,000	98.15
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	18,865,100	18,860,350	99.97	
			Program Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	88,245,000	88,146,800	99.89	

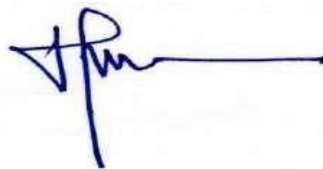
			Program Penanganan Pengaduan dan Pengembangan Data	373,775,150	365,823,001	97.87	
4	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan (persen)	11.22	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	604,689,949	405,276,971	67.02
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	394,815,000	364,633,750	92.36	
			Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	79,060,000	77,805,000	98.41	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1,818,201,000	1,680,803,132	92.44	
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	404,717,500	178,630,000	44.14	
5	Meningkatnya kesempatan kerja	Angka Pengangguran Terbuka (persen)	2.31	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	309,605,000	293,626,500	94.84
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	177,885,000	175,686,000	98.76	
			Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	19,850,000	19,550,000	98.49	

6	Meningkatnya jumlah desa cepat berkembang	Prosentase jumlah desa dengan kategori cepat berkembang	6.64	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kampung	913,495,500	864,344,600	94.62
				Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	82,683,000	60,275,300	72.90
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung	85,754,000	85,389,320	99.57
				Program peningkatan kapasitas aparaturn kampung	275,679,000	259,929,350	94.29
7	Meningkatnya pelayanan kepada calon transmigran	Jumlah peserta tranmigran yang diberangkatkan	20 KK	Program transmigrasi regional	106,806,600	95,550,000	89.46
8	Menjaga ketersediaan pangan masyarakat	Rasio Ketersediaan pangan utama (beras)kg/ perkapita	583.35	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	244,265,000	241,828,700	99.00
				Program Penanganan Rawan Pangan	211,438,500	201,133,500	95.13
				Program Peningkatan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	256,414,625	250,852,235	97.83
				Program Pengembangan Ketersediaan dan cadangan pangan	83,507,000	64,289,400	76.99

			Program Pengembangan Keamanan pangan	126,300,000	96,805,000	76.65
			Program Pengembangan Distribusi Informasi Harga dan Pasokan Pangan	293,170,000	278,413,125	94.97
	JUMLAH PROGRAM	Program : 62		36,514,544,966	33,856,305,779	92.72
	JUMLAH ANGGARAN					

Gunung Sugih, 29 Maret 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH



MUSA AHMAD

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MISI IV

KABUPATEN : LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (tahun)	8.26	Program Pendidikan Anak Usia Dini	637,284,000	526,086,800	82.55
	Lama harapan sekolah (tahun)	12.26	Program Wajib Belajar 9 Tahun	22,220,067,200	22,046,471,500	99.22
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	189,030,071,450	161,521,451,450	85.45
	Nilai rata-rata ujian SD	76.5	Program Pendidikan Non Formal	430,075,000	422,458,540	98.23
	Nilai rata-rata ujian SMP	80.85	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	22,604,446,700	22,554,608,100	99.78
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	482,559,700	476,652,700	98.78
2 Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	69.5	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	129,949,332	67,691,500	52.09
	Angka Kematian Bayi (Per 1000)	2.5	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	66,879,400	66,448,900	99.36

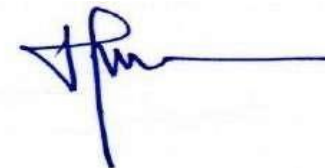
	Angka Kematian Ibu (Per 100.000)	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1,962,959,000	1,885,401,095	96.05
	Prevalensi Stunting (Persen)	13	Program Obat dan perbekalan kesehatan	2,761,818,128	2,369,360,378	85.79
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	299,382,500	247,951,900	82.82
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat	26,106,540	23,129,080	88.59
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	1,224,318,488	860,280,142	70.27
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	53,787,567,664	35,586,881,212	66.16
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	22,720,415,200	18,127,502,726	79.79
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	42,548,000	19,215,000	45.16
			Program Peningkatan Sarana Kesehatan dan Obat-obatan	49,955,601,000	36,259,898,396	72.58
			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	5,868,224,000	5,762,141,831	98.19
			Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	211,155,000	144,471,890	68.42

			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	33,302,042,798.93	21,594,646,393.88	64.84	
3	Meningkatnya pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	0.78	Program pelayanan kontrasepsi	118,450,000	118,237,100	99.82
			Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	1,500,000	1,500,000	100.00	
			Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	42,500,000	42,350,000	99.65	
			Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	9,700,000	9,700,000	100.00	
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja	2,250,000	2,250,000	100.00	
			Program Pengendalian Penduduk	54,959,400	51,609,400	93.90	
			Program Peningkatan Dukungan Sarana dan Prasarana Penyuluh KB	7,322,002,091	4,379,303,699	59.81	
			Program Peningkatan Advokasi dan KIE KB	69,692,000	69,059,600	99.09	
4	Meningkatnya partisipasi perempuan dan perlindungan anak	Indek Pembangunan Gender (persen)	89.48	Program Peningkatan peranserta dan kesetaraan Gander dlm pembangunan	272,300,000	272,017,000	99.90

	Prosentase penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	32,812,000	32,453,500	98.91	
			Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	134,428,650	132,635,275	98.67	
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	38,620,200	37,661,700	97.52	
5	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Prosentase peningkatan jumlah wirausahaan muda	5	Program peningkatan peran serta kepemudaan	935,416,500	623,726,200	66.68
	Prosentase cabor yang berprestasi	25	Program Promosi dan Peningkatan Prestasi Olah raga	251,405,000	251,130,250	99.89	
	JUMLAH PROGRAM		Program : 33	417,049,506,942	336,586,383,258	80.71	
	JUMLAH ANGGARAN						

Gunung Sugih, 29 Maret 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH



MUSA AHMAD

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MISI V

KABUPATEN : LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN : LAMPUNG
2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Indek Kualitas Air (IKA)	55	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	175,450,000	165,254,640	94.19
	Indek Kualitas Udara (IKU)	77.5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1,008,300,000	963,368,500	95.54
			Program Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup	53,000,000	49,720,000	93.81
	Indek Tutupan Lahan (TTL)	35	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya alam	30,795,000	27,750,000	90.11
			Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	25,600,000	13,762,000	53.76
			Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	13,984,467,000	12,903,473,164	92.27

2	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap RTRW (persen)	80	Program Perencanaan Tata Ruang	235,565,000	223,117,000	94.72
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	357,518,520	192,222,000	53.77
3	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Prosentase desa siaga bencana	3.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	52,451,500	37,181,500	70.89
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	10,664,843,223	753,978,323	7.07
				Program Penanggulangan Korban Bencana Alam	187,317,000	33,700,000	17.99
				Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	22,008,000	21,798,000	99.05
		JUMLAH PROGRAM		Program : 11	26,797,315,243	15,385,325,127	57.41
		JUMLAH ANGGARAN					

Gunung Sugih, 29 Maret 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSA AHMAD

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MISI VI

KABUPATEN : LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Kategori)	B	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2,291,052,539	2,035,699,707	88.85
	Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Opini)	WTP	Program Pengembangan data/informasi Pembangunan	80,919,600	80,560,600	99.56
			Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	491,649,200	390,707,000	79.47
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	1,253,981,748	1,083,565,809	86.41
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1,203,930,387	1,192,253,287	99.03
			Program perencanaan pembangunan daerah	1,214,164,700	1,146,445,200	94.42

			Program Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	373,803,550	370,927,956	99.23
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	273,108,000	108,994,200	39.91
			Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	108,450,000	83,770,000	77.24
			Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	44,582,500	38,072,700	85.40
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2,682,672,500	2,538,504,000	94.63
2	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	9	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	241,700,000	217,900,000	90.15
			Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah	1,115,141,460	1,036,519,062	92.95
			Program Peningkatan dan Pengembangan Anggaran Daerah	3,733,601,130	3,543,544,390	94.91

			Program Peningkatan dan Pertanggungjawab Pendapatan dan Belanja Daerah	1,399,911,680	1,307,154,050	93.37	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah	824,613,994	704,859,400	85.48	
			Program Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan	643,325,000	627,224,500	97.50	
			Program Peningkatan, Pengendalian PAD dan Pengembangan TI	1,298,852,700	1,118,546,100	86.12	
			Program Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Rumah Makan, Pajak Hotel, BPHTB dan Sarang Burung Walet	103,936,700	88,465,000	85.11	
			Program Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Reklame, Air Bawah Tanah, Parkir, Hiburan dan Minerba	178,990,000	130,630,000	72.98	
3	Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (Nilai)	80.93	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	123,539,358,562	113,008,757,068	91.48
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	61,143,420,661	55,194,866,624	90.27	

			Program peningkatan disiplin aparat	1,321,925,000	1,301,713,150	98.47
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat	4,151,774,390	2,847,171,922	68.58
			Program pengadaan dan penataan karir pegawai	1,083,160,000	1,006,116,296	92.89
			Program Pembinaan dan Fasilitas ASN	418,216,850	381,897,147	91.32
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	4,591,904,000	2,902,856,572	63.22
			Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	55,893,017	55,593,600	99.46
			Program Peningkatan Layanan Informasi Perpustakaan	102,865,381	99,881,730	97.10
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	72,812,520	72,490,703	99.56
			Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	18,030,000	17,535,600	97.26
			Program Pengembangan dan Peningkatan Persandian dan Keamanan data	106,800,000	105,200,337	98.50

			Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	1,226,719,000	1,056,800,001	86.15
			Program optimalisasi teknologi informasi kepegawaian	172,173,000	119,822,500	69.59
			Program Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	555,611,500	528,384,500	95.10
			Program Perkembangan Kawasan Tecnopark	32,465,000	22,185,000	68.34
			Program Penelitian dan Perkembangan Sosial dan Pemerintahan	102,055,000	100,230,000	98.21
			Program Penelitian dan Perkembangan Ekonomi dan Pembangunan	143,346,000	128,444,000	89.60
			Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	17,704,583,859	13,594,247,946	76.78
			Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	82,323,782	24,948,277	30.31
			Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	2,788,560,000	2,649,331,741	95.01

			Program Koordinasi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan	64,879,100	38,754,100	59.73
			Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	10,704,850	10,592,350	98.95
			Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	34,312,500	28,146,600	82.03
			Program Pengembangan Perusahaan Daerah	6,593,300	5,306,975	80.49
			Program Peningkatan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	222,941,000	221,362,400	99.29
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	61,039,000	61,039,000	100.00
			Program Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Administrasi	86,577,500	86,519,000	99.93
			Koordinasi dan Konsultasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Staf Ahli Bupati	236,781,900	157,698,250	66.60
			Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	5,248,161,172	2,783,618,313	53.04
			Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	2,180,906,612	1,807,237,419	82.87
			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	331,095,000	261,254,650	78.91
			Program Kesadaran dan Penegakan Hukum	300,075,000	72,750,000	24.24

			Program Pengembangan Perekonomian Daerah	532,001,554	411,017,726	77.26
			Program Pelayanan Peningkatan Religiusitas Masyarakat	480,784,000	464,724,000	96.66
			Program Pelayanan Peningkatan Apresiasi Terhadap Masyarakat	8,380,000,000	8,114,962,500	96.84
			Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1,554,864,200	1,436,230,000	92.37
			Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	254,159,400	204,099,400	80.30
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3,745,550,529	3,702,537,100	98.85
			Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	13,250,000	13,250,000	100.00
	JUMLAH PROGRAM	Program : 58		262,717,061,527	232,943,917,458	88.67
	JUMLAH ANGGARAN					

Gunung Sugih, 29 Maret 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSA AHMAD